



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS **RENSTRA**

TAHUN **2019 - 2024**

DP3AK

**DINAS PEMBERDAAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 358 SURABAYA
TELP/FAX (031) 99842251**

HTTP

<https://dp3ak.jatimprov.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada tahun 2021 ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah selesai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019—2024 dikarenakan adanya kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain hal tersebut, adanya pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang berdampak pada Refocusing Anggaran serta Perubahan Kondisi Makro Ekonomi, sehingga perlu adanya penyesuaian Target Kinerja Pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 digunakan sebagai dasar pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan.

Sebagaimana amanat yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dilaksanakan guna mendukung **Misi Kedua** yaitu **“Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”**.

Kami sadar bahwa di dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019-2024 ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran demi perbaikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan sehingga apa yang menjadi visi dan misi dari Jawa Timur dapat

tercapai.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2019-2024.

Surabaya, 21 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dra. RESTU NOVI WIDIANI, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19661117 199103 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	16
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	16
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	42
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	57
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	64
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	64
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	67
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	70
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	82
3.5 Penentuan Isu – isu strategis.....	82
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	88
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	88
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	93
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	96
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	164
BAB VIII PENUTUP.....	167

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra DP3AK tahun 2021 perlu dilakukan untuk menyelaraskan dengan berbagai perubahan peraturan nasional dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Adanya kebijakan nasional terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuthiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang harus segera diberlakukan di daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan Perubahan. Selain itu adanya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang berdampak pada Refocusing Anggaran serta Perubahan Kondisi Makro Ekonomi, sehingga perlu adanya penyesuaian Target Kinerja Pembangunan. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) DP3AK Provinsi Jawa Timur yang telah dirubah ini dapat sebagai upaya mendorong partisipasi aktif bagi para pejabat dan menjadi perangkat aktif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Perubahan DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 merupakan landasan bagi penentuan arah kebijakan, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur telah menyusun Renstra mengacu pada **Visi Gubernur** yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Kemudian mengacu pada **Misi Ke-2** yaitu “Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan” dan mengacu pada kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD 2019-2024. Renstra ini disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran dan masa depan DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan 3 (tiga) urusan tersebut diatas secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan DP3AK Provinsi Jawa Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Tiga urusan yaitu 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta 3) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertulis sebagai Urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amanah tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Urusan tersebut merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui Pembangunan Responsif Gender bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender di semua sektor pembangunan. Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Di Jawa Timur telah di tindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.

Proses penyusunan Perubahan Renstra DP3AK sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur dalam Bagian Kelima tentang Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Pasal 359 dinyatakan bahwa tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah berlaku *mutatis mutandis* terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan tersebut meliputi; (a) Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra, (b) Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra, (c) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra, dan (d) Penetapan Perubahan Renstra.

Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan Renstra DP3AK Provinsi Jawa Timur dengan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dengan komitmen Pembangunan Responsif Gender dalam bentuk penyelarasan target antara Renstra dengan RPJMD, karena Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020 masih mencapai 91,07 sedangkan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) Tahun 2019 mencapai 73,04. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat pembangunan. Maka dengan itu dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh terhadap pencapaian IDG dan IPG yang baik melalui penyelarasan target. Hal ini juga mendukung pencapaian tujuan 1 (satu) Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), yaitu meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sementara itu, Perlindungan Anak ditujukan untuk Pemenuhan Hak Anak seluruh anak mulai dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) Tahun. Indikator pencapaian pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Timur akan diwujudkan dengan target pencapaian Indeks Perlindungan Anak (IPA). Kebijakan ini diambil dalam rangka mendukung secara penuh terhadap tujuan 2 (dua) Renstra KPPPA, mengingat DP3AK Provinsi Jawa Timur yang merupakan instansi vertikal dari KPPPA. Target ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem

Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Permasalahan anak selalu berkembang seiring dinamika jaman, sehingga kompleksitas kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga tanggung jawab swasta dan masyarakat yang saling mendukung dan sinergis. Untuk mewujudkan tanggungjawab tersebut provinsi dan kab/kota didorong menjadi Provinsi/Kabupaten/Kota layak Anak dengan pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator Perlindungan Anak.

Urusan kedua, yaitu Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga berencana. Pengendalian Penduduk, bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Pengendalian penduduk akan diwujudkan melalui partisipasi keikutsertaan masyarakat yang aktif dalam program keluarga berencana. Upaya pengaturan Kelahiran melalui keikutsertaan masyarakat dalam keluarga berencana saat ini dengan capaian Cakupan Keluarga Berencana aktif Tahun 2020 sebesar 75,55 %, masih cukup banyak masyarakat belum sadar untuk ber KB; untuk perkawinan anak dibawah usia 19 tahun di Jawa Timur sebesar 3,98% dan dari 38 kabupaten/kota 3 daerah tertinggi yaitu di kabupaten Pasuruan sebanyak 890 anak, Jember sebanyak 1.066 anak, dan Malang sebesar 1,468 anak, selain itu pada era perkembangan informasi yang terbuka seperti saat ini peningkatan ketahanan keluarga menjadi sangat berat lagi upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan keluarga, banyaknya perceraian, kenakalan anak dan tuntutan/gaya hidup yang semakin berubah.

Ketiga, Kebijakan Administrasi Kependudukan merupakan upaya penyelenggaraan administrasi kependudukan, mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta penyajian data kependudukan skala provinsi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data kependudukan yang akurat tercapai 99,70% dari total target 100%, masih ada masyarakat belum tercatat dalam administrasi kependudukan karena pemahaman terhadap manfaat data kependudukan serta keterjangkauan akses pencatatan masih ada dengan berbagai alasan tidak hanya karena demografi. Target Pembangunan, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra selanjutnya menjadi acuan untuk Menyusun Rencana Kerja tahunan guna memastikan bahwa pelaksanaan anggaran di tahun berkenaan memiliki kontribusi bagi pemenuhan target jangka menengah DP3AK Provinsi Jawa Timur.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2019-2024 Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi terhadap Hak Anak;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
17. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga , Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan;
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
26. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
27. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

28. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
29. Peraturan Bersama Tiga Menteri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiksi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
39. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
40. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV / AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

- 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor X Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor X Seri X, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor XX);
 47. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
 48. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
 49. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
 50. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor : 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis DP3AK Provinsi Jawa Timur ini adalah penyelarasan tujuan, sasaran dan Arah Kebijakan serta indikator baik program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Timur sesuai dengan perubahan regulasi yang terkait agar konsistensi dengan Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur.

Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah :

- a. Menindaklanjuti berbagai kebijakan nasional, yang paing urgent adalah penyesuaian terhadap perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Menjadikan dokumen perencanaan ini sebagai pedoman Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Timur dalam merencanakan, melaksanakan tugas-tugas dan fungsi serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan dana yang di alokasikan.
- c. Membangun kesepahaman dengan seluruh pemangku kepentingan demi pembangunan Jawa Timur yang lebih produktif, efesien dan efektif, berkeadilan dan berkelanjutan terutama dalam masa pemulihan akibat Pandemi Covid-19.
- d. Menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan dan sekaligus untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan administrasi kependudukan.

- e. Mengoptimalkan penjabaran Perubahan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja (Renja) yang memuat rancangan program dan kegiatan, anggaran pada masing-masing program dan kegiatan, serta penanggungjawab program / kegiatan pembangunan periodisasi 1 (satu) tahunan selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II – GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV – TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII – PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan juga telah diubah berkali kali yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102) serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

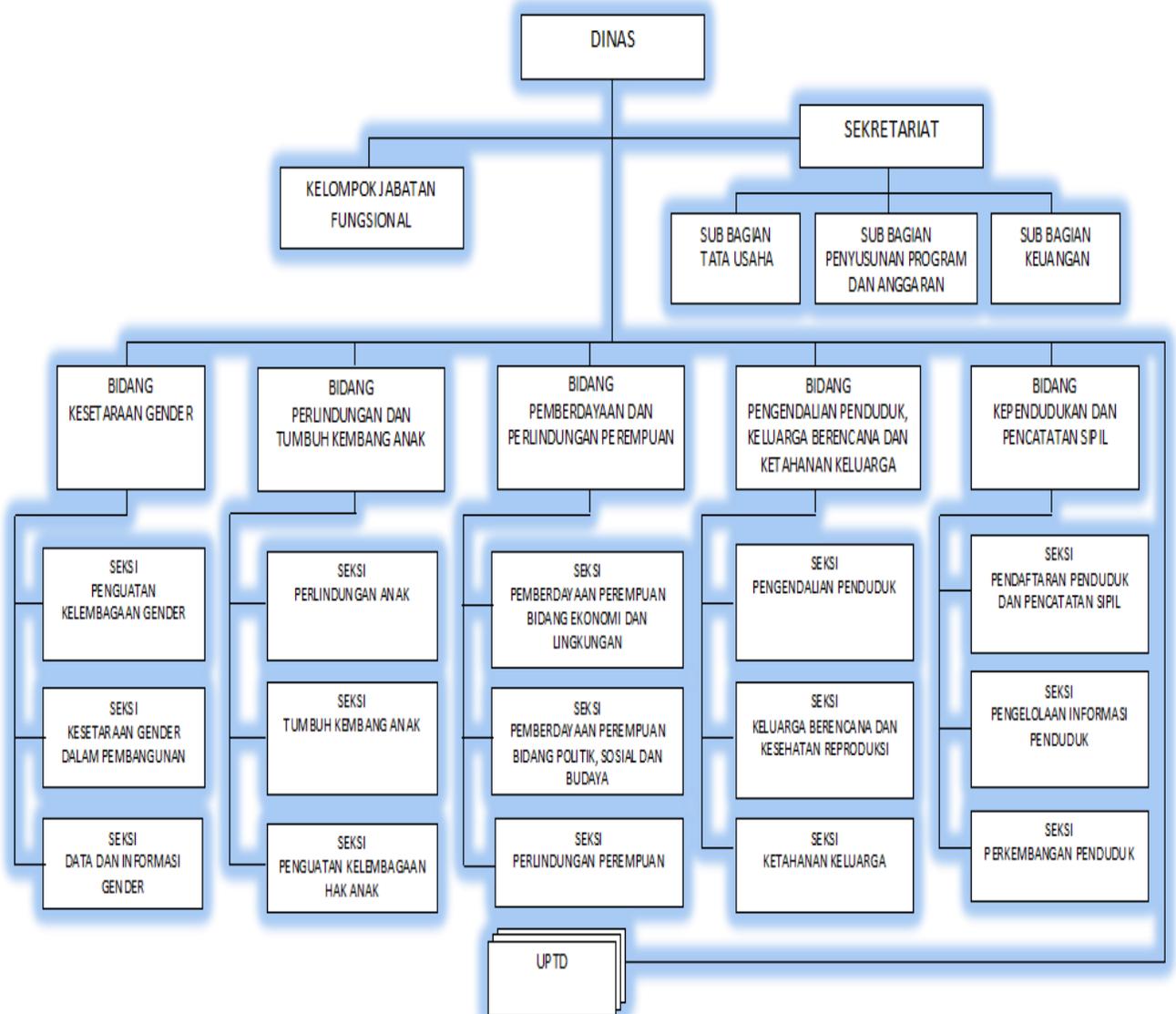
Tugas Pokok dan Fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019, DP3AK Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR
 (Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019)



Secara umum DP3AK Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan bidang yaitu: (1) Pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak; (2) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan (3) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan 3 (tiga) urusan DP3AK Provinsi Jawa Timur dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang yaitu : (a) Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

(b) Bidang Pemenuhan Hak Anak; (c) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; (d) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan (e) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara khusus Sekretariat, membawahi 3 sub bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Bidang Kesetaraan Gender membawahi :

- 1) Seksi Penguatan Kelembagaan Gender;
- 2) Seksi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
- 3) Seksi Data dan Informasi Gender.

Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi :

- 1) Seksi Perlindungan Anak;
- 2) Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
- 3) Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak.

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, membawahi :

- 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Sosial, dan Budaya; dan
- 3) Seksi Perlindungan Perempuan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan

Keluarga, membawahi :

- 1) Seksi Pengendalian Penduduk;
- 2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
- 3) Seksi Ketahanan Keluarga.

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membawahi :

- 1) Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 2) Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk; dan
- 3) Seksi Perkembangan Penduduk.

Berikut akan dipaparkan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Tugas Pokok Sekretariat adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Sedangkan Fungsi Sekretariat adalah :

- 1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) Pengelolaan aset dan barang milik negara;
- 6) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 10) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

- 11) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi Dan tatalaksana;
Dan
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi di Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan dan pengamanan perlengkapan dan aset;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data, perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;
- f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Kesetaraan Gender

Tugas Pokok Bidang Kesetaraan Gender adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang Kesetaraan Gender.

Sedangkan fungsi Bidang Kesetaraan Gender adalah :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kesetaraan Gender;
- 2) perumusan pedoman teknis dan program Kesetaraan Gender;
- 3) pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait Pengarusutamaan Gender;
- 4) penyusunan Sistem Informasi Data Gender;
- 5) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang Kesetaraan Gender;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Kesetaraan Gender; dan
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi di Bidang Kesetaraan Gender terdiri atas :

1. Seksi Penguatan Kelembagaan Gender, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait Penguatan Kelembagaan Gender;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait penguatan kelembagaan gender;
- c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan gender;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait penguatan kelembagaan gender;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang responsif gender;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi penguatan kelembagaan gender;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan gender;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kesetaraan gender dalam pembangunan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender dalam pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan pedoman kesetaraan gender dalam pembangunan;

- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana prasarana yang responsif gender;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait kesetaraan gender dalam pembangunan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dalam pembangunan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kesetaraan gender dalam pembangunan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Sistem Data dan Informasi Gender, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait data dan informasi gender;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait data dan informasi gender;
- c. melaksanakan pengolahan, analisis dan penyajian data Gender;
- d. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi terkait data gender;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data Gender;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

D. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak

Tugas Pokok Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak.

Sedangkan fungsi Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak adalah :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- 2) perumusan pedoman teknis dan program perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- 3) pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait perlindungan anak;
- 4) pelaksanaan sistem informasi data perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- 5) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak; dan
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas :

1. Seksi Perlindungan Anak, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perlindungan anak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait perlindungan anak;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait perlindungan anak;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait perlindungan anak;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan anak;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait perlindungan anak;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

2. Seksi Tumbuh Kembang Anak, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait tumbuh kembang anak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait tumbuh kembang anak;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait tumbuh kembang anak;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait tumbuh kembang anak;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tumbuh kembang anak;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait tumbuh kembang anak;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

3. Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait penguatan kelembagaan hak anak;

- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- e. menyiapkan bahan pengolahan data kelembagaan hak anak;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi penguatan kelembagaan hak anak;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

E. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Tugas Pokok Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Sedangkan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- b. perumusan pedoman teknis dan program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- c. pelaksanaan pengolahan data Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi di Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terdiri atas :

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- e. menyiapkan bahan pengolahan data Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial

Budaya, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- e. menyiapkan bahan pengolahan data Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

3. Seksi Perlindungan Perempuan, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait Perlindungan Perempuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program

- terkait Perlindungan Perempuan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait Perlindungan Perempuan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait Perlindungan Perempuan;
 - e. menyiapkan bahan pengolahan data Perlindungan Perempuan;
 - f. Menyiapkan bahan analisis dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi Perlindungan Perempuan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Perlindungan Perempuan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

F. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga

Tugas Pokok Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.

Sedangkan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;

- b. perumusan pedoman teknis dan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
- c. pelaksanaan pengolahan data Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
- e. Pelaksanaan Penguatan kelembagaan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga terdiri atas :

1. Seksi Pengendalian Penduduk, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait pengendalian penduduk;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait pengendalian penduduk;
- e. menyiapkan bahan pengolahan data pengendalian penduduk;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengendalian penduduk; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

2. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi dalam bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dalam pelaksanaan program bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. menyiapkan bahan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Ketahanan Keluarga, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program ketahanan keluarga;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pembangunan keluarga, pembinaan ketahanan keluarga;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dalam pelaksanaan program bidang ketahanan keluarga;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam ketahanan keluarga;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan keluarga, pembinaan ketahanan keluarga; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

G. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas Pokok Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menghimpun, mengolah dan menyajikan data penduduk hasil pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta melakukan pembinaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Sedangkan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penyusunan database hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Sistem Administrasi Kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. penyajian, pemanfaatan dan pengelolaan informasi data kependudukan;
- h. penyusunan profil kependudukan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

- 1. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**, yang mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengumpulan, penghimpunan, pengolahan, penyajian dan pengolahan data hasil registrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- c. menyiapkan bahan perumusan fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menyiapkan bahan penyusunan data hasil registrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyajian dan pengelolaan informasi data kependudukan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan kebijakan pengembangan informasi kependudukan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi kerja sama pemanfaatan data kependudukan, dokumen kependudukan dan Nomor Induk Kependudukan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan publikasi dan sosialisasi kebijakan kependudukan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan media informasi;
- g. menyiapkan bahan informasi data kependudukan;
- h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi data kependudukan; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

3. Seksi Perkembangan Penduduk, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan data perkembangan penduduk;
- b. menyiapkan bahan data Sistem Administrasi Kependudukan dalam rangka pengendalian kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan profil kependudukan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penduduk; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

H. Unit Pelayanan Teknis (UPT) DP3AK Provinsi Jawa Timur

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DP3AK Provinsi Jawa Timur.

Tugas Pokok Unit Pelayanan Teknis (UPT) DP3AK Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan khusus.

Sedangkan fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. Pelayanan pengaduan masyarakat;
- c. Pelayanan penjangkauan korban;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pelayanan perlindungan dan pengamanan;
- f. Pelayanan penanganan korban dan pengelolaan kasus;
- g. Pelayanan rehabilitasi kesehatan fisik, psikologi dan sosial;
- h. Pelayanan bantuan hukum;
- i. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program anggaran dan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dokumentasi data dan kearsipan UPT;

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

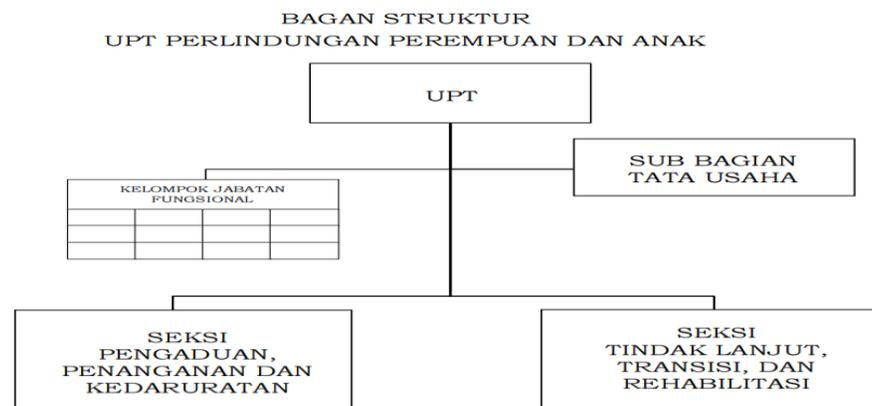
2. Seksi Pengaduan, Penanganan, dan Kedaruratan, yang mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan seksi Pengaduan, menyusun perencanaan kegiatan seksi Pengaduan, Penanganan dan Kedaruratan;
- b. melaksanakan penerimaan pengaduan dan penjemputan terhadap korban yang berada dalam kondisi kritis;
- c. melaksanakan penerimaan rujukan dari aparat penegak hukum dan lembaga layanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan lembaga layanan yang dibentuk oleh masyarakat secara langsung atau melalui telepon;
- d. melaksanakan asesmen untuk menentukan korban masuk ke Rumah Aman Emergensi atau Rumah Aman Transisi;
- e. fasilitasi Visum et Repertum dan Visum et Repertum Psikiatri;
- f. fasilitasi penanganan medis terhadap dampak kekerasan;
- g. melaksanakan psikoterapi dan/atau psikososial;
- h. fasilitasi bantuan hukum;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

3. Seksi Tindak Lanjut, Transisi, dan Rehabilitasi, yang mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Tindak lanjut, Transisi dan Rehabilitasi;

- b. melaksanakan mediasi dan konseling;
- c. fasilitasi layanan penanganan medis, psikoterapi dan/atau psikososial lanjutan;
- d. fasilitasi pemulangan purna layanan;
- e. melakukan kunjungan rumah setelah pemulangan purna layanan;
- f. melakukan pemantauan korban bekerja sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang membidangi perlindungan perempuan dan anak atau lembaga penyedia layanan yang dibentuk masyarakat di tempat korban berdomisili;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.



Pada saat dibentuknya UPT DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, pejabat yang menduduki jabatan masih belum dilantik, belum mempunyai kantor, belum ada sarana dan prasarana penunjang kegiatan, serta SDM.

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Dalam Pelaksanaan kinerjanya DP3AK Provinsi Jawa Timur didukung dengan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM)

Gambaran sumber daya yang ada di DP3AK Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Jumlah Data Pegawai di DP3AK Provinsi Jawa Timur
berdasar Kepangkatan/Golongan
Per 01 Januari 2021

No.	Pangkat	Gol.	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pembina Utama Madya	IV/ d	0	0	0	0%
2	Pembina Utama Muda	IV/ c	0	0	0	0%
3	Pembina Tk. I	IV/ b	1	3	4	5%
4	Pembina	IV/ a	8	8	16	18%
5	Penata Tk. I	III / d	8	4	12	14%
6	Penata	III / c	3	2	5	6%
7	Penata Muda Tk. I	III / b	6	6	12	14%
8	Penata Muda	III / a	4	0	4	5%
9	Pengatur Tk. I	II / d	0	4	4	5%
10	Pengatur	II / c	2	0	2	2%
11	Pengatur Muda Tk. I	II / b	0	0	0	0%
12	Pengatur Muda	II / a	1	0	1	1%
13	Juru	I / c	0	0	0	0%
14	Tenaga Kontrak	-	22	6	28	32%
Jumlah			55	33	88	100%

Sumber : Data Sub Bagian Tata Usaha per 1 Januari 2021

Jika melihat data diatas mayoritas SDM di DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah tenaga kerja kontrak sebanyak 32%. Selanjutnya SDM ASN yang dominan adalah mereka yang memiliki pangkat Pembina (IV/a). Hal ini menjadi kekuatan tersendiri karena tingginya kepangkatan terkait dengan pengalaman kerja dan tinginya kompetensi.

SDM di D3PAK Provinsi Jawa Timur terbagi berdasar jabatan (Tabel 2), untuk jabatan Eselon II adalah kepala Dinas, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV sejumlah 17 orang dan mayoritas (76%) merupakan staf. Kepangkatan sangat penting artinya karena terkait dengan kewenangan, pengambilan keputusan, dan peran dalam Dinas.

Tabel 2.2
Data Jumlah Data Pegawai di DP3AK Provinsi Jawa Timur
berdasar Jabatan
Per 01 Januari 2021

No.	Jabatan	Satuan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	Eselon II	Orang	0	1	1	1%
2.	Eselon III	Orang	2	4	6	6%
3.	Eselon IV	Orang	8	9	17	17%
4.	Staf	Orang	48	29	77	76%
Jumlah		Orang	58	43	101	100%

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per 1 Januari 2021

Jika dilihat dari komposisi umum dan jenis kelamin, Mayoritas (57%) SDM di DP3AK masih didominasi laki-laki. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan jika DP3AK yang notabene mengurus permasalahan gender identik dengan perempuan. Mayoritas laki-laki yang menjadi SDM di DP3AK adalah staf. Sedangkan yang menduduki posisi Eselon II, III dan IV masih lebih banyak perempuan.

Tabel 2.3
Data Jumlah Pegawai DP3AK Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Usia/Umur
Per 01 Januari 2019

No.	Golongan Umur	Satuan	Jumlah	%
1.	< 30 tahun	orang	7	8%
2.	30-39 tahun	orang	31	35%
3.	40-49 tahun	orang	14	16%
4.	> 50 tahun	orang	36	41%
Jumlah		orang	88	100%

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per 1 Januari 2021

Sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur saat ini dalam kondisi baik dan dapat difungsikan sesuai fungsinya. Sarana dan Prasarana sebagai pendukung kinerja pada DP3AK Provinsi Jawa Timur yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur
per 01 Januari 2021

SARANA PRASARANA KANTOR DP3AK PROV JATIM TAHUN 2021

NO	KODE BARANG	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	0101110401	Tanah Bangunan Kantor di Jl. Ngagel 102 Sby	1580	m2
2	0101110401	Tanah Bangunan Kantor di Jl. Jagir No. 358 Sby	5470	m2
3	0202030402	Genset	2	unit
4	0203010103	Kendaraan Roda 4	9	unit
5	0203010501	Kendaraan Roda 2	11	unit
6	0206010101	Mesin Ketik Manual	7	unit
7	0206010104	Mesin Ketik Elektrik	7	unit
8	0206010401	Lemari Besi	72	unit
9	0206010403	Rak Kayu / Tempat buku perpustakaan	10	unit
10	0206010404	Filling Cabinet	49	Unit
11	0206010412	Lemari Kaca	4	unit
12	0206010413	Lemari Makan	1	unit
13	0206020403	AC Unit	35	unit
14	0206020607	Loudpeaker/Colling Speaker	1	unit
15	0206010505	Alat Penghancur Kertas	2	unit
16	0206010510	White Board	2	unit
17	0206020301	Mesin Penghisap Debu	1	unit
18	0206020101	Lemari Kayu	6	unit
19	0206020102	Tempat Koran	4	unit
20	0206020149	Kursi Tamu/Sofa	7	unit
21	0206020412	Air Purifier	2	unit
22	0206020614	Pesawat Telepon	10	unit
23	0206030203	Note Book	51	unit
24	0206030408	Printer	86	unit

NO	KODE BARANG	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
25	0206040104	Meja Eselon II	1	unit
26	0206040304	Kursi Eselon II	1	unit
27	0206040105	Meja Eselon III	5	unit
28	0206040305	Kursi Eselon III	4	unit
29	0206040106	Meja Eselon IV	17	unit
30	0206040306	Kursi Eselon IV	18	unit
31	0206040505	Kursi Hadap	30	unit
32	0207010101	Camera+Attachment	10	unit
33	0207010213	TV/Video Monitor	5	unit
34	0206010406	Brankas	8	unit
35	0206020104	Meja Kerja	52	unit
36	0206040108	Meja Kerja Non Struktural	22	unit
37	0206020111	Meja Kerja	24	unit
38	0206020105	Kursi Staf malvin	15	unit
39	0206020130	Kursi Putar	39	unit
40	0206020110	Meja Rapat	101	unit
41	0206020127	Kursi Rapat	192	unit
42	0206040308	Kursi Kerja Non Struktural	37	unit
43	0206020603	Televisi	13	unit
44	0206030104	Internet/Pasang Jaringan Internet	1	unit
45	0206030201	Komputer PC/PC Unit	63	unit
46	0206030312	Hardisk/External	13	unit
47	0206030410	Scanner	8	unit
48	0207010262	Handycam/Camera Film	2	unit
49	0206020401	Lemari Es	11	unit
50	0206020639	Dispenser	3	unit
51	0207010103	Proyektor Attachment	10	unit
52	0207010203	Camera Elektronik	3	unit
53	0207020108	Sound System	4	unit
54	0206010209	Mesin Absen	4	unit
55	0206020701	Alat Pemadam Kebakaran Portable	8	unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2015-2018 secara terinci sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian		KETERANGAN
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						(8)		(9)		(10)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	√	72,89	70,57	70,97	71,37	71,77	72,17	73,04	73,04	100,20	103,50	
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	-	-	-	√	30%	47%	50%	55%	60%	65%	37,57%	37,29	125,23	79,34%	
3	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan	-	-	-	√	15%	15,1%	15,2%	15,3%	15,4%	15,5%	16,7%	18,33%	111,33	121,39%	
4	Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	-	-	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	
5	Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan	-	-	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	
6	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak	-	-	-	√	86,84 %	86,84%	89,47%	89,47%	94,73%	100%	92,10%	92,10%	106,06	106,06%	
7	Cakupan KB Aktif (CPR)	-	-	-	√	71%	75,90%	76,15%	76,40%	76,65%	76,90%	75,72%	75,69%	106,64	99,72%	
8	Persentase Data Penduduk yang Akurat	-	-	-	√	100%	99,75%	99,80%	99,85%	99,90%	99,95%	99,47%	99,95%	99,47	100,20%	

1. Pencapaian Indikator **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** pada tahun tahun 2019 sebesar 73,04, sedangkan untuk pencapaian tahun 2020 belum bisa dipublikasikan, diperkirakan pada pertengahan tahun 2021.

Ada 3 (tiga) komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislatif atau eksekutif sangat mempengaruhi Status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua perempuan juga mempunyai hak AKSES (ikut), PARTISIPASI (mempunyai suara), KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.

2. Pencapaian Indikator **Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)** tahun 2019 sebesar 37,57% dan tahun 2020 sebesar 37,29%.

Dokumen ARG adalah dokumen yang disusun perangkat daerah yang terdiri dari 3 jenis dokumen yaitu *Gender analisis Patway (GAP)*; *Gender Budget Statement (GBS)* dan *Term Of Reference (ToR)*. ARG merupakan implementasi perangkat daerah dalam mendukung pembangunan responsif gender melalui upaya menemukenali isu gender dan kemudian menyusun rencana intervensi melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dirangkum dalam Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG) seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran bersama (SEB) 4 (empat)

menteri yaitu Menteri Bappenas, Menteri Keuangan , Menteri Dalam Negeri & Kementerian Pemberdayaan perempuan & Perlindungan Anak (PPPA).

Di Jawa Timur semua perangkat daerah telah menyusun dokumen ARG. Meningkatnya Persentase ARG sebenarnya bukan capaian mutlak yang harus dikejar oleh perangkat daerah. Tetapi bagaimana kualitas ARG dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menghasilkan output dan outcome yang menuju keadilan dan kesejahteraan gender. Dokumen ARG terwujud karena dorongan Tim Penggerak (*Driver*) dan seluruh Focal Point di seluruh Perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang didampingi oleh para fasilitator gender.

Namun demikian hasil evaluasi pembangunan responsif gender melalui Anugrah Parahita Ekapraya (APE) menunjukkan bahwa ARG belum mengarah pada intervensi untuk isu-isu IPM dan isu pembangunan prioritas yang lainnya sehingga Pembangunan Responsif Gender belum menunjukkan peningkatan dukungan dalam capaian IPG yang optimal.

3. Pencapaian Indikator **Persentase Perempuan Pengambil Keputusan** pada tahun 2019 sebesar 16,7% dan Tahun 2020 sebesar 18,33%

Dalam Undang-Undang Pemilu mengharuskan 30% perempuan dicalonkan sebagai anggota DPR tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun demikian, keterwakilan perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen masih tetap di bawah angka yang diinginkan (30%). Di bidang ekonomi juga mengalami hal yang sama. Peran aktif perempuan masih sangat kecil sehingga masih persentase perempuan pengambil keputusan yang belum signifikan.

4. Pencapaian Indikator **Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan** pada Tahun 2019 sebesar 100%, dan pencapaian untuk tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini sebagai wujud Komitmen DP3AK Jatim dalam mendukung tujuan 4 (empat) Renstra KPPPA yang sasaran strategisnya adalah menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO.

Kekerasan adalah segala bentuk yang mengakibatkan lahirnya sebuah kesakitan (yang belum pernah didefinisikan dengan jelas). Masih banyak perempuan korban tidak berani (malu) untuk menceritakan pengalaman kekerasannya dan terkadang lambat mendatangi lembaga pengada layanan untuk meminta pertolongan. Penangan perempuan korban kekerasan disini adalah jumlah kasus yang lapor ke unit pelayanan dan yang ditangani oleh unit pelayanan.

DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui P2TPA dalam pelayanannya memberikan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk kasus yang terlapor segera ditangani sesuai dengan kasus yang dialami juga melakukan pendampingan terhadap korban.

5. Pencapaian Indikator **Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan** pada tahun 2019 sebesar 100%, dan pencapaian untuk tahun 2020 sebesar 100%. Capaian ini mendukung sasaran strategis ketiga KPPPA, yaitu meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Disebutkan dalam Undang Undang, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi

baik ekonomi, seksual, penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru dan pendamping.

DP3AK Provinsi Jawa Timur, dalam melakukan penanganan korban kekerasan terhadap anak dengan melakukan pendampingan, atas kasus tindak kekerasan yang dilaporkan, dan semua kasus tindak kekerasan pada anak yang dilaporkan ditindaklanjuti. Selain itu, dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak DP3AK mendorong dan memberikan penguatan terhadap terbentuknya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal itu agar anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa dapat benar benar terlindungi, tumbuh dan berkembang secara wajar.

6. Pencapaian Indikator **Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak** pada Tahun 2019 sebesar 92,10% dan tahun 2020 pencapaiannya sebesar 92,10% dengan tingkat capaian sebesar 106,06%.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak harus memenuhi 5 (lima) klaster perlindungan yang disyaratkan yaitu : (1) Hak Sipil Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; (5) Perlindungan Khusus dan dalam 5 Klaster tersebut terdapat 24 Indikator yang juga disyaratkan dalam penilaian KLA (Kota Layak Anak) di Kabupaten/Kota. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 35 Kabupaten/Kota telah mendapatkan Penghargaan KLA, yang belum mendapatkan 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Ponorogo. Untuk itu di tahun mendatang, DP3AK Provinsi Jawa Timur perlu melakukan pendampingan kepada 3 (tiga) Kabupaten/Kota tersebut. Namun dalam melakukan pendampingan tidak hanya berhenti setelah semua kabupaten/kota di Jawa Timur telah mendapatkan penghargaan KLA, tetapi juga perlu melakukan pendampingan untuk meningkatkan komitmen daerah dalam pengembangan KLA.

7. Pencapaian Indikator **Cakupan KB Aktif (CPR)** pada tahun 2019 sebesar 75,72% sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 75,69%.

Penduduk sebagai objek dan subjek perlu dikenali, diidentifikasi, dipilah dan dianalisis sehingga intervensi pembangunan akan lebih tepat sasaran, dan salah satu data terpenting terkait kependudukan adalah angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut CPR (Contraceptive Prevalance Rate). CPR adalah presentase perempuan usia produktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada waktu tertentu.

Adapun data yang diperoleh dari CPR adalah angka Peserta KB aktif (PA) dibanding jumlah Pasangan Usia Subur (PUS).

8. Pencapaian Indikator **Persentase Data Penduduk yang akurat** pada tahun 2019 sebesar 99,47% dan untuk pencapaian tahun 2020 sebesar 99,95%.

Data Penduduk yang akurat adalah kepemilikan dokumen yang dimiliki oleh penduduk yaitu yang terdiri dari : (1) dokumen kependudukan berupa e-KTP, (2) dokumen kependudukan yang berupa Akte Kelahiran, dan (3) dokumen kependudukan yang berupa Akte Kematian.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran						Rasio Realisasi Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Program Tahun 2019																				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,810,398,500	-	-	-	-	-	2,732,221,334	-	-	-	-	-	97.22	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,120,084,500	-	-	-	-	-	3,796,765,611	-	-	-	-	-	92.15	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	920,482,000	-	-	-	-	-	898,954,828	-	-	-	-	-	97.66	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1,298,033,500	-	-	-	-	-	1,297,049,489	-	-	-	-	-	99.92	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1,445,000,000	-	-	-	-	-	1,395,090,203	-	-	-	-	-	96.55	-	-	-	-	-	-	-
6	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	2,264,450,000	-	-	-	-	-	2,145,560,633	-	-	-	-	-	94.75	-	-	-	-	-	-	-
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	2,268,000,000	-	-	-	-	-	2,207,217,218	-	-	-	-	-	97.32	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran						Rasio Realisasi Anggaran Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
8	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,281,250,500	-	-	-	-	-	1,273,775,248	-	-	-	-	-	99.42	-	-	-	-	-	-	-
9	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,890,735,000	-	-	-	-	-	2,862,758,811	-	-	-	-	-	99.03	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH ANGGARAN	19,298,434,000	-	-	-	-	-	18,609,393,375	-	-	-	-	-	96.43	-	-	-	-	-	-	-
	Program Tahun 2020																				
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	-	5,724,345,058	-	-	-	-	-	5,649,399,728.15	-	-	-	-	-	98.69	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	730,875,455	-	-	-	-	-	726,534,459	-	-	-	-	-	99.41	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	-	990,174,562	-	-	-	-	-	989,321,665	-	-	-	-	-	99.91	-	-	-	-	-	-
4	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	-	938,574,562	-	-	-	-	-	935,913,150	-	-	-	-	-	99.72	-	-	-	-	-	-
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	1,295,305,637	-	-	-	-	-	1,290,203,072	-	-	-	-	-	99.61	-	-	-	-	-	-
6	Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	643,924,547	-	-	-	-	-	643,439,950	-	-	-	-	-	99.92	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH ANGGARAN	-	10,323,199,821	-	-	-	-	-	10,234,812,024.15	-	-	-	-	-	99.14	-	-	-	-	-	-
	Program Tahun 2021																				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	21.109.241.925	22.436.482.000	22.757.889.000	23.062.582.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.341.548.731

No	Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran						Rasio Realisasi Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	4.100.712.920	2.614.750.000	2.614.750.000	2.614.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.986.240.730	-
3	Program Perlindungan Perempuan	-	-	1.994.205.500	380.000.000	380.000.000	380.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783.551.375	-
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	108.629.000	125.250.000	125.250.000	125.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.094.750	-
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	-	606.804.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391.701.000	-
6	Program Pemenuhan Hak Anak	-	-	1.662.588.709	1.180.000.000	1.180.000.000	1.180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.647.177	-
7	Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	1.098.535.431	590.000.000	590.000.000	590.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717.133.858	-
8	Program Pendaftaran Penduduk	-	-	977.600.991	510.000.000	510.000.000	510.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626.900.248	-
9	Program Pencatatan Sipil	-	-	851.907.500	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.976.875	-
10	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	1.156.457.734	510.000.000	510.000.000	510.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671.614.434	-
11	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	-	-	420.629.555	420.000.000	420.000.000	420.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.157.389	-
12	Program Pengendalian Penduduk	-	-	642.020.000	639.105.000	639.105.000	639.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639.833.750	-
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-	-	302.303.245	310.895.000	310.895.000	310.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.747.061	-
14	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	-	-	497.636.490	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.409.123	-

No	Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran						Rasio Realisasi Anggaran Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
	<i>UPT DP3AK</i>																					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	1.344.000.000	1.344.000.000	1.344.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.344.000.000	-
2	Program Perlindungan Perempuan	-	-	-	583.000.000	583.000.000	583.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.995.125	-
3	Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	-	625.000.000	625.000.000	625.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.000.000	-
	JUMLAH ANGGARAN	-	-	35.529.273.000	33.088.482.000	33.409.889.000	33.714.582.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.573.556.500	-

Anggaran Tahun 2019 yang diterima DP3AK Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 36.891.498.000,-, untuk tahun 2020 sebesar Rp. 24.836.246.821,- dan untuk tahun 2021 sebesar Rp. 35.529.273.000,-, Adapun realisasinya untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 34.643.150.144,- dan tahun 2020 sebesar Rp, 23.913.504.062,15. Jika dilihat dari anggaran yang diterima dengan realisasi menunjukkan perencanaan program berjalan dengan baik sehingga yang dianggarkan mencapai target.

Pada tahun 2020 anggaran DP3AK Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan, hal ini diakibatkan adanya pandemi covid 19, anggaran direcofusing atau dialihkan untuk penanganan pandemi covid 19. Pada Tahun 2021, kejadian Pandemi Covid-19 masih berlangsung, sehingga DP3AK Provinsi Jawa Timur mengalami refocusing anggaran.

Tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.088.482.000,- untuk tahun 2023 sebesar Rp. 33.409.889.000,- dan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 33.714.582.000,-.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan Peran dan Fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- a. IPG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. Walaupun IPM dapat menggambarkan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru

sedang menjadi isu global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing-masing komponennya. IPG memiliki komponen-komponen pembentuk yaitu angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. IPG merupakan salah satu instrument untuk mengidentifikasi apakah masih terdapat diskriminasi gender. Selisih antara IPM dan IPG sebenarnya menunjukkan tingkat koreksi terhadap IPM yang diakibatkan oleh adanya disparitas gender. Dalam kondisi ideal, yaitu ketika disparitas gender relatif rendah, maka nilai selisih antara kedua indeks ini akan mendekati nol. Selisih antara IPM dan IPG pada suatu wilayah pada dasarnya memperlihatkan tingkat disparitas atau kesetaraan gender dalam capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Maksudnya, jika selisih antara IPM dan IPG untuk suatu wilayah semakin besar maka kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut semakin buruk, sebaliknya jika selisihnya semakin kecil maka kesetaraan gendernya akan semakin baik. Jika mengacu pada data BPS, selisih antara IPM (metode baru) dengan IPG masih cukup besar. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan gender yang cukup besar pada pembangunan di Jawa Timur.

- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Timur masih mencapai 73,04 pada tahun 2019. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan

keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survey) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (current condition) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi IDG adalah Keterwakilan di Parlemen (Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan), Pengambilan keputusan (Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan) dan Distribusi Pendapatan (Upah Buruh Non Pertanian; Laki-laki & Perempuan).

Tantangan Pengembangan Pelayanan PD :

- a) Kompetensi SDM masih kurang/terbatas
- b) Koordinasi dengan kabupaten/kota belum optimal
- c) Belum tersedianya data terpilah secara memadai
- d) Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender
- e) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan
- f) Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak

- g) Belum setaranya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
- h) Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- i) Lemahnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk.
- j) Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- k) Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP
- l) Makin derasnya pengaruh Teknologi Informasi yang berdampak pula pada meningkatnya arus trafficking dan kejahatan gender melalui media sosial.

Peluang Pengembangan Pelayanan PD

- a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan:
 - 1) Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan : Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
 - 2) Tujuan 2 - Tanpa kelaparan : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
 - 3) Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera : Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

- 4) Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas : Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
- 5) Tujuan 5 - Kesetaraan gender : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
- 6) Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak : Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- 7) Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau : Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- 8) Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi : Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur : Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- 10) Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan : Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan : Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- 12) Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab : Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- 13) Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim : Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Tujuan 14 - Ekosistem laut : Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan

15) Tujuan 15 - Ekosistem daratan : Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16) Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh : Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

17) Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan : Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur secara eksplisit ada beberapa tujuan SDGs yang berkaitan secara langsung yaitu tujuan 5 (kesetaraan gender). Meski demikian di tujuan yang lain juga terkait dengan Tugas, pokok dan fungsi DP3AK karena di dalamnya menyangkut kepentingan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, terkait dengan pengendalian penduduk maupun KB. Hal ini menunjukkan jika permasalahan gender merupakan masalah global sehingga terbuka peluang untuk dilakukan Networking dalam mencari solusi bagi permasalahan gender. Dengan masuknya kesetaraan gender dalam tujuan SDGs menunjukkan bahwa issue gender merupakan isu nasional dan penting yang menjadi peluang bagi DP3AK untuk melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.

b) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir memberikan keynote speech pada Seminar Women's Participation for Economic Inclusiveness yang membahas kesetaraan gender merupakan isu global dan juga menjadi isu prioritas nasional. Bank Dunia memperkirakan bahwa kesenjangan gender menyebabkan hilangnya pendapatan rata-rata 15 persen di negara-negara anggota OECD, 40 persen diantaranya disebabkan oleh entrepreneurship gaps.

(www.kemenkeu.go.id: 2018). Di Indonesia, kesempatan bersekolah bagi anak perempuan dan laki-laki sudah hampir setara. Namun, ketika memasuki dunia kerja terjadi penurunan hingga 50% bagi perempuan. Peran perempuan sebagai ibu dan istri menjadi hambatan dalam meneruskan karirnya. Selain itu, gender bias juga terjadi di berbagai bidang pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, hanya 30% perempuan yang berkecimpung di bidang industri Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Oleh karena itu, penting juga bagi Pemerintah untuk mengurangi gender bias tersebut agar anak-anak perempuan di Indonesia mampu menggapai mimpi di berbagai bidang. Tiap negara yang ingin meraih ketahanan ekonomi, mereka harus berinvestasi di kesehatan dengan mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan kesempatan mendapatkan pendidikan, serta memastikan adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam ekonomi. Hal ini menunjukkan jika permasalahan gender merupakan isu prioritas Nasional sehingga memberikan peluang yang besar bagi DP3AK untuk berperan dalam mewujudkan kesetaraan gender.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender di Jawa Timur, baik di level pemerintah, swasta maupun masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya integrasi program/kegiatan Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan askes partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. • PUG belum menjadi sasaran utama dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Perencanaan dan Penganggaran berbasis PUG perlu ditingkatkan - Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain - Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	
2	Belum Optimalnya Database Sistem Informasi Gender dan anak secara terpilah dan terintegrasi di Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor. • Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator - Belum ada/belum disusun sistem aplikasi yang secara otomatis outputnya berupa data terpilah gender dan anak
3	Upaya pencapaian target mengenai Pemenuhan Hak Anak yang belum optimal.	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kab/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung - Belum menjadi pengarusutamaan seperti halnya kesetaraan gender.
4	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Upaya penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak belum terintegrasi baik secara vertikal (Provinsi dan Kabupaten) maupun secara horizontal.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya komitmen kerja sama yang kuat dan sinergis antara semua pihak yang terkait. - Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan - Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua - Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak
5	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Pencegahan dan pengawasan terhadap Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perdagangan Orang (TPPO) belum menjadi isu utama	- Pembahasan dan kesadaran masyarakat tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih rendah.
6	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Peran kelembagaan masyarakat dalam membantu pemerintah belum optimal	- Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan - Adanya faktor budaya/kultural di beberapa daerah di Jawa Timur yang mendukung pernikahan usia anak
7	Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Parlemen	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	- Adanya hambatan faktor budaya/kultural dan pemahaman mengenai peran perempuan di wilayah publik
8	Kesejahteraan dan kemandirian perempuan yang relative rendah.	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	- Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan
9	Pemanfaatan Profil Kependudukan sebagai penunjang pembangunan belum optimal.	Database kependudukan yang belum akurat	- Implementasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal, SIAK dan database kependudukan belum optimal - Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)
10	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,79% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2020)	Pelibatan informal leader dan Lembaga mesyarakat untuk mensosialisasikan KB belum sinergi dengan kabupaten dan Kota.	- Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019 -2024 adalah :

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

MISI :

- 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok, Antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;**
- 2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;**
- 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;**
- 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya;**

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah **Misi 2**, yaitu:

“Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan			
	Bhakti 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar Berkualitas"			
1	Optimalisasi Pemenuhan Ruang Laktasi, Ramah Anak dan Disabilitas di Perkantoran, Sekolah, dan Berbagai Ruang Publik yang lain	Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) merupakan permasalahan lintas sektor (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan askes partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	<ul style="list-style-type: none"> - PUG merupakan strategi dalam Kebijakan Pembangunan di Jawa Timur - Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG

VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi		
2		Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	- Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang kebijakan satu data provinsi
3		Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kab/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	- Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
4		Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan	- Adanya Perda No. 11 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
			Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak – anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua	- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5		Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal	Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan
6		Tingginya tingkat	Belum optimalnya pendewasaan usia	Kebijakan Bimbingan Pra

VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pernikahan pada usia anak	pernikahan	Nikah sebagai syarat wajib pernikahan
7		Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
8		Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan lembaga legislatif
9		Database kependudukan yang belum akurat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)	Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013 akan segera berlaku efektif sehingga mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan
10		Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018)	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Selain memperhatikan issue strategis di Provinsi Jawa Timur, juga melihat perkembangan global dengan mengacu pada SDGs (Sustainable Development Goals). Pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Berbeda dari pendahulunya *Millenium Development Goals* (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

Tabel 3.3
Isu Strategis Global

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SDGs (TUJUAN 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan Terbatasnya Akses Sumber Daya dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	SDGs (TUJUAN 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja • Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (trafficking) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya. • Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan • Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional • Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik • Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk property lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional • Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan • Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender • Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender disemua sektor pembangunan • Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing Perangkat Daerah • Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsive Gender kedalam perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) • Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang Bias Gender • Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak • Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang 	
	SDGs (TUJUAN 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki • Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP). 	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	perempuan	Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya	<ul style="list-style-type: none"> Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana 	

DP3AK Provinsi Jawa Timur sebagai Dinas yang menangani 3 Urusan, yaitu : 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 3) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Kementerian/Lembaga yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah 1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 3) Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian.

Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AK harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Adapun sasaran KPPA yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian PPPA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender di Jawa Timur, baik di level pemerintah maupun masyarakat. 	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	<ul style="list-style-type: none"> - PUG merupakan strategi dalam Kebijakan Pembangunan di Jatim - Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
		Belum Optimalnya Sistem Informasi Database Gender terpilah secara Terintegrasi di Jawa Timur.	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang kebijakan satu data provinsi
		Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
		Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan lembaga legislative
2	Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kualitas Kelembagaan Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Khusus Anak	Upaya pencapaian target mengenai Pemenuhan Hak Anak yang belum optimal.	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kab/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung
		Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Peran kelembagaan masyarakat dalam membantu pemerintah belum optimal	Kebijakan Bimbingan Pra Nikah sebagai syarat wajib pernikahan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan - Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Adanya Perda No. 11 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
4	Menurunnya Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ruang Publik, Domestik, Tempat Kerja, Situasi Darurat Kondisi Khusus, dan Perempuan Korban TPPO, Serta Meningkatkan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal	Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan
5	Meningkatnya Layanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.	Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kab/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	- Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA

Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AK juga harus mendukung pencapaian sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Adapun sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
Sasaran Renstra BKKBN

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i>	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Timur 0,79% dari jumlah penduduk (Data Statistik Tahun 2020)	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pasca salin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (CPR)</i>	Dukungan intervensi program dan kegiatan yang relative kecil.	Tupoksi kelembagaan DP3AK yang relative kecil	Dapat dilakukan koordinasi dan sinergi dengan Lembaga/badan yang terkait
3	Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi / <i>Unmeet Need</i>	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Kebijakan Bimbingan Pra Nikah sebagai syarat wajib pernikahan
4	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun/ <i>Age Specify Fertility Ratio (ASFR)</i>	Belum optimalnya Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	- Kapasitas tim Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Komitmen sinergitas dengan Lembaga/organisasi masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana)	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Kebijakan Bimbingan Pra Nikah sebagai syarat wajib pernikahan
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Kebijakan Bimbingan Pra Nikah sebagai syarat wajib pernikahan

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Dukcapil. Adapun sasaran Kemendagri yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
Sasaran Renstra Kemendagri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Database kependudukan yang belum akurat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)	Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013 akan segera berlaku efektif sehingga mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan

Tabel 3.7
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong"						
NO	Misi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3AK	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
			PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	MISI 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan	Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) merupakan permasalahan lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	<ul style="list-style-type: none"> PUG merupakan strategi dalam Kebijakan Pembangunan di Jatim Adanya Tim Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan Focal Point Gender sudah berjalan 	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	Banyak lembaga swasta dan masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
2		Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor.	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada/belum disusun sistem aplikasi yang secara otomatis outputnya berupa data terpilah gender dan anak Belum semua perangkat daerah provinsi mempunyai data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Tim Data Terpilah Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang kebijakan satu data provinsi 	Belum semua perangkat daerah kabupaten/Kota sebagai mitra provinsi mempunyai data terpilah	Adanya Himbauan Kementerian PPPA dan Peran Sebagian NGO yang concern terhadap data terpilah gender.

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

NO	Misi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3AK	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
			PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
3		Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kab/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Gugus Tugas KLA	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
4		Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya SDM /pendidikan dari masyarakat Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa KDRT merupakan AIB keluarga sehingga mereka enggan melaporkan kasusnya. Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya inovasi publik P2TP2A, dengan berperan aktifnya, tokoh agama dalam rangka penanganan kasus Adanya Perda No. 11 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT Adanya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di seluruh Kab/Kota

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

NO	Misi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3AK	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
			PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
5		Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD Provinsi terkait	Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal	Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan
6		Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Kebijakan Bimbingan Pra Nikah sebagai syarat wajib pernikahan	Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil kegiatan pencegahan pernikahan dini.
7		Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya sasaran tentang kesetaraan Gender dalam RPJMD provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024	Masih adanya bias gender dalam masyarakat berupa stigma menomorduakan perempuan dalam parlemen dan ruang publik	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

NO	Misi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3AK	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
			PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
8		Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Adanya Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait	Stigma negative Masyarakat dan dunia usaha terhadap usaha ekonomi sektor informal perempuan.	Adanya dukungan kebijakan pusat (Kementerian PPPA) terhadap ekonomi perempuan sektor informal.
9		Database kependudukan yang belum akurat	Implementasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal, SIAK dan Database kependudukan belum optimal	Adanya kewajiban mengisi data pribadi (NIK, NKK) dalam setiap verifikasi registrasi layanan tertentu tingkat provinsi.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013 akan berlaku secara efektif sehingga mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan
10		Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,79% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2020)	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Kebijakan Bimbingan Pra Nikah sebagai syarat wajib pernikahan	Adanya Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah di luar kewenangan provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengacu Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031, serta Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDG'S Ke-5 yaitu : "Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan". Dari hasil analisis hasil analisis terhadap KLHS adalah tidak semua indikator SDG's yang menjadi kewenangan provinsi dapat diakomodir ke dalam dokumen perencanaan, karena keterbatasan sumber data yang tersedia.

3.5 Penentuan Isu – isu strategis

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara :

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FDG) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut :

Tabel 3.8
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria *)	Bobot **)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan Tugas dan Tanggungjawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka b), dengan mengisi table sebagai berikut :

Tabel 3.9
Nilai Skala Kriteria

No	Nilai Skala Kriteria ke							Total Skor
	Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) di Jawa Timur.	0.2	0.1	0.2	0.1	0.15	0.25	1
2	Internalisasi dan Penguatan Aksi Pemenuhan Hak Anak Lintas Sektor dan di seluruh level pemerintahan sebagai upaya percepatan pencapaian 5 klaster dan 24 Indikator kab/Kota layak Anak.	0.2	0.1	0.2	0.1	0.12	0.22	0.94
3	Pencegahan dan Penanganan terhadap Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelibatan Peran serta masyarakat.	0.15	0.1	0.15	0.1	0.18	0.25	0.93
4	Pencegahan dan Pendampingan/Advokasi terhadap Tindakan Perdagangan Orang (TPPO) secara Berkelanjutan.	0.2	0.1	0.15	0.07	0.15	0.25	0.92
5	Edukasi berbasis Masyarakat untuk Pencegahan pernikahan Pada Usia Anak	0.15	0.1	0.2	0.09	0.10	0.23	0.87
6	Upaya Strategis Penguatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen dan Lembaga Publik Lainnya	0.2	0.07	0.2	0.05	0.10	0.20	0.82
7	Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas Perempuan pelaku Ekonomi Sektor Informal.	0.15	0.1	0.17	0.05	0.07	0.20	0.74
8	Pemantapan database Kependudukan yang menjadi kewenangan provinsi secara berkelanjutan.	0.15	0.1	0.17	0.05	0.07	0.19	0.73
9	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur.	0.14	0.10	0.08	0.08	0.10	0.22	0.72

- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Rata-Rata Skor Isu-isu strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) di Jawa Timur.	1,00	0.167	1
2	Internalisasi dan Penguatan Aksi Pemenuhan Hak Anak Lintas Sektor dan di seluruh level pemerintahan sebagai upaya percepatan pencapaian 5 klaster dan 24 Indikator kab/Kota layak Anak.	0.94	0.157	2
3	Pencegahan dan Penanganan terhadap Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelibatan Peran serta masyarakat.	0.93	0.155	3
4	Pencegahan dan Pendampingan/Advokasi terhadap Tindakan Perdagangan Orang (TPPO) secara Berkelanjutan.	0.92	0.153	4
5	Edukasi berbasis Masyarakat untuk Pencegahan pernikahan Pada Usia Anak	0.87	0.145	5
6	Upaya Strategis Penguatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen dan Lembaga Publik Lainnya	0.82	0.137	6
7	Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas Perempuan pelaku Ekonomi Sektor Informal.	0.74	0.123	7
8	Pemantapan database Kependudukan yang menjadi kewenangan provinsi secara berkelanjutan.	0.73	0.122	8
9	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur.	0.72	0.120	9

Dari hasil rata-rata skor tersebut diatas dapat dilakukan pemeringkatan terhadap isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan gender (*gender equality*) di Jawa Timur.

Pada Isu Strategis peningkatan kesetaraan gender, mencakup 7 (tujuh) persyaratan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu; (a) Komitmen; (b) Kebijakan dan Program; (c) Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG); (d) Sumber Daya meliputi SDM, Anggaran dan Sarana Prasarana; (e) Data Terpilah SIM, (f) Tools, meliputi panduan, modul dan bahan KIE, dan (g) Jejaring (Networking) dengan seluruh Stakeholder kesetaraan gender.

2. Internalisasi dan Penguatan Aksi Pemenuhan Hak Anak Lintas Sektor dan di seluruh level pemerintahan sebagai upaya percepatan pencapaian 5 klaster dan 24 Indikator kab/Kota layak Anak.

Isu Strategis ini merupakan implementasi dari program dan kegiatan yang merupakan wewenang provinsi sekaligus pemantapan koordinasi dengan kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam rangka pencapaian 5 Klaster dan 24 Indikator kabupaten/Kota Layak Anak.

3. Pencegahan dan Penanganan terhadap Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelibatan Peran serta Masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur masih relative tinggi, hal ini patut menjadi perhatian besar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Sebagai komitmen afirmatif terhadap isu ini, maka dipandang perlu untuk dimasukkan dalam Isu Strategis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Perubahan Tahun 2019-2024.

4. Pencegahan dan Pendampingan/Advokasi terhadap Tindakan Perdagangan Orang (TPPO) secara Berkelanjutan.

Kejadian TPPO di Jawa Timur relative tinggi, data Polda Jatim menunjukkan kejadian berkisar antara 19-20 orang per tahun di tiga tahun terakhir. Korban perdagangan orang ini mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Latar belakang umum yang menjadi penyebab terjadinya kasus TPPO itu, adalah minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai modus-modus TPPO, sehingga modus umum tentang TPPO adalah hak dan kewajiban dalam dunia kerja. Terkait dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur memandang perlu melakukan penguatan melalui KIE TPPO dan Upaya peningkatan ekonomi keluarga.

5. Edukasi berbasis Masyarakat untuk Pencegahan pernikahan Pada Usia Anak.

Berpijak pada data dari Pengadilan Agama, sepanjang Tahun 2020 di Jawa Timur terdapat sebanyak 9.453 kasus pernikahan pada usia anak. Angka itu setara 4,97 persen dari total 197.068 pernikahan yang tercatat di Pengadilan Agama setempat. Secara persentase, angka tersebut mengalami peningkatan dibanding 2019 sebesar 3,6 persen. Namun menurut jumlah justru mengalami penurunan. Pada 2019 angka pernikahan usia anak di Jawa Timur sebanyak 11.211 kasus dari total 340.613 angka perkawinan yang tercatat di Pengadilan Agama. Surat Edaran Gubernur Jatim tentang pencegahan perkawinan anak telah diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021. Diharapkan ini akan menjadi salah satu langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menekan angka pernikahan pada usia anak

6. Upaya Strategis Penguatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen dan Lembaga Publik Lainnya.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2019 menunjukkan Keterwakilan perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur hanya 22 orang atau 18,4 persen pada periode 2019 - 2024. Fenomenas ini masih jauh dari harapan ideal sebanyak 30%. Dengan demikian upaya sinergis dan terintegrasi untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran perempuan di Lembaga legislative maupun Lembaga publik lainnya perlu mendapat dukungan dalam program dan kegiatan.

7. Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas Perempuan pelaku Ekonomi Sektor Informal.

Keterlibatan peran perempuan dalam usaha ekonomi sektor informal di Jawa Timur perlu ditindaklanjuti dengan data dan informasi yang akurat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa peran perempuan dalam mendukung perekonomian keluarga, sehingga ke depan dapat dilakukan upaya penguatan kapasitas dan edukasi yang memadai, agar peran ekonomi ini dapat mendukung pada aspek kesetaraan gender, dan pada sisi lain tetap menempatkan perempuan sebagaimana

mestinya dengan melindungi hak-haknya secara utuh. Masih belum optimalnya pengakuan dan data peran perempuan dalam ekonomi sektor informal ini menjadi isu Strategis yang akan didukung dengan implementasi program dan kegiatan.

8. Pemanfaatan database Kependudukan yang Menjadi Kewenangan Provinsi secara Berkelanjutan.

Meskipun kewenangan / proporsi administrasi kependudukan dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah banyak diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, namun terdapat peran strategis Provinsi Jawa Timur, yaitu yang terkait dengan data lintas kabupaten dan Kota, serta pemanfaatan secara integrative data kependudukan untuk mendukung kebijakan kependudukan di Jawa Timur.

9. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur.

Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Timur sebesar 0,79% dari jumlah penduduk berdasarkan Data Statistik Tahun 2020, memberikan pijakan untuk dilakukan upaya strategis untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk tersebut. Hal ini sesuai kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadi Isu Strategis mengingat pengendalian penduduk menjadi salah satu pilar penting untuk menciptakan ketahanan sosial berkelanjutan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah DP3AK Provinsi Jawa Timur merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dilengkapi dengan indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah DP3AK Provinsi Jawa Timur merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan jangka menengah, yang dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AK Provinsi Jawa Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

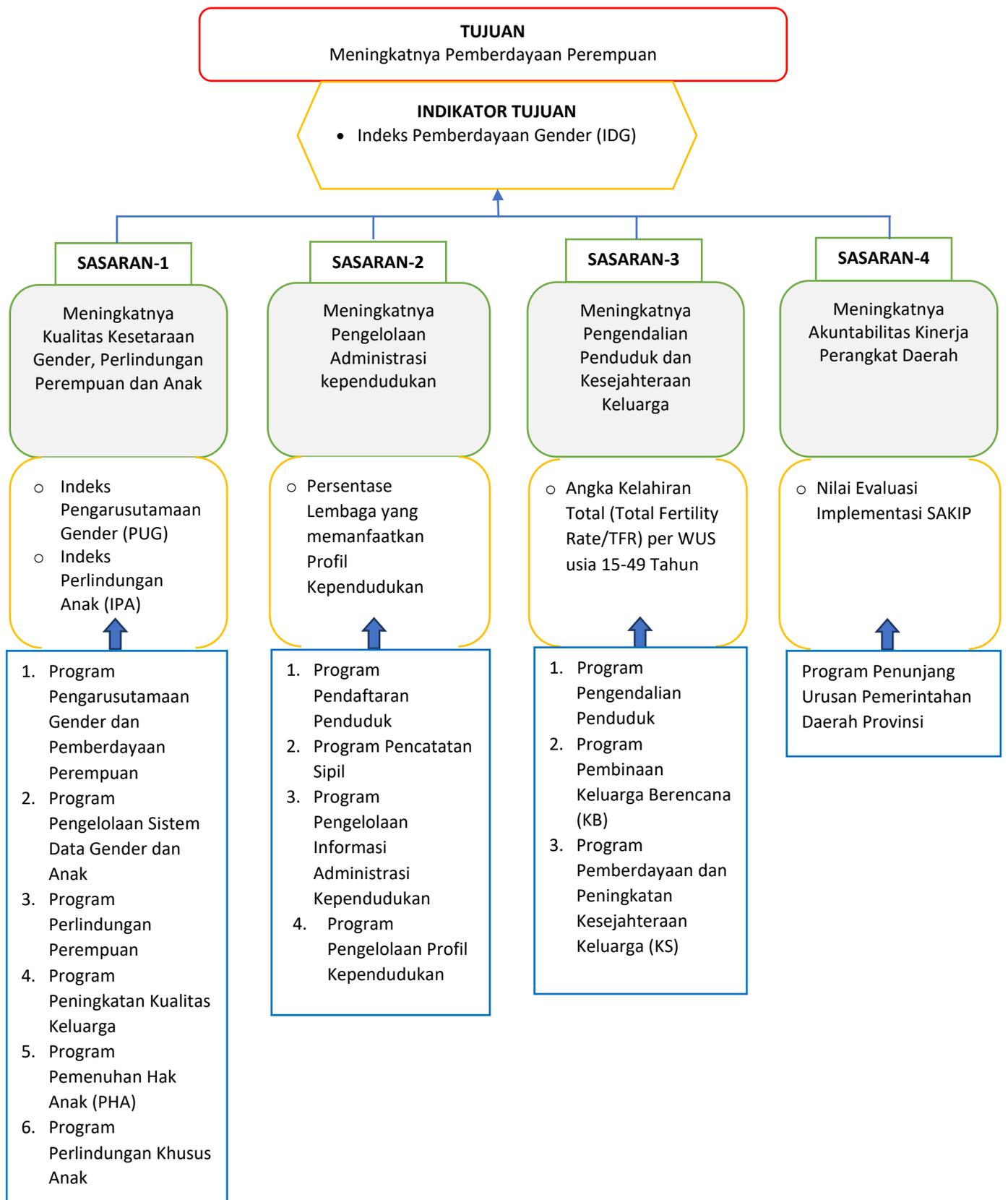
Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN								
					2019		2020		TARGET KINERJA				
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2024	
1	Tujuan Renstra Murni												
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	72,89	73,04	70,57	73,04 (Data tahun 2019)	-	-	-	-	
		Meningkatnya Komitmen Pembangunan Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	30%	37,57%	47%	37,29%	-	-	-	-	
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan pengambil keputusan	Persen	15%	16,7%	15,1%	16,7%	-	-	-	-	
			Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	Persen	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	
		Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Penanganan Anak korban Kekerasan	Persen	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	
			Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	86,84%	92,10%	86,84	92,10%	-	-	-	-	
		Meningkatnya pengendalian penduduk	Cakupan KB Aktif (CPR)	Persen	71%	75,27%	75,90%	75,69%	-	-	-	-	
			Persentase Data Penduduk Yang Akurat	Persen	100%	99,47%	99,75%	99,88%	-	-	-	-	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN								
					2019		2020		TARGET KINERJA				
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2024	
2	Tujuan Renstra Perubahan												
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	-	73,04	-	73,03	73,04	73,44	73,84	74,24	
		Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks	-	-	-	0,93 (Data Hasil Penilaian APE 2020 belum resmi dari KPPA)	0,94	0,95	0,96	0,97	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	-	71,80	-	-	71,80	71,80	71,85	71,90	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	Persen	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persen	-	2,28	-	2,29	1,91	1,89	1,86	1,83	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	-	-	82,15	-	-	82,23	82,31	82,39	82,47	

Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara umum hierarki Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, sebagai berikut.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AK yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara DP3AK mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3AK. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi RPJMD	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong		
Misi Ke-2 RPJMD	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatkan kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Strategi Bidang Kesetaraan gender: Penguatan Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program Kesetaraan Gender	Implementasi 7 Prasyarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong Lahirnya Komitmen Melalui Pembentukan Perda PG; ▪ Kebijakan dan Program KG yang terinisiasi Jelas dalam Dokumen renstra dan Renja PD Terkait; ▪ Koordinasi dan Integrasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender secara Rutin dan Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas Sumber Daya meliputi SDM, Anggaran dan Sarana Prasarana; ▪ Pembangunan Data Terpilah KG, ▪ Implementasi Tools, meliputi panduan, modul dan bahan KIE, dan ▪ Penguatan dan efektivitas kerja Jejaring (Networking) dengan seluruh Stakeholder kesetaraan gender.
		<p>Strategi Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak: Masifikasi kampanye anti kekerasan terhadap anak dan mendorong terwujudnya Kota Layak Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan sosialisasi berbagai produk hukum tentang penghapusan segala bentuk kekerasan, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, ▪ Pemantapan sinergi kebijakan lintas kelembagaan secara vertikal dan horizontal.
		<p>Strategi Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan: Akselerasi peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui pelibatan berbagai stakeholder strategis berbasis masyarakat,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi, ▪ Meningkatkan sosialisasi berbagai produk hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking ▪ Sosialisasi dan pembinaan dengan melibatkan informal leader/panutan masyarakat, ▪ Intensifikasi kerjasama dengan Ormas, OKP dan kelompok Perempuan secara berkelanjutan, ▪ Pelaksanaan koordinasi dan integrasi program dan kegiatan dengan kabupaten/Kota
	2. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	<p>Strategi Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil : Meningkatkan Kualitas, Kelengkapan data dan Informasi kependudukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kualitas Profil Kependudukan Jawa Timur sebagai dasar pengambilan kebijakan kependudukan dengan didukung sistem informasi yang valid dan realtime. ▪ Fasilitasi dan pembinaan administrasi kependudukan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Strategi Bidang Kependudukan: Meningkatkan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deseminasi program Pengendalian Penduduk melalui media kreatif. ▪ Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berbasis masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan di atas, selanjutnya menjadi acuan DP3AK Provinsi Jawa Timur untuk Menyusun prioritas tahunan dalam Rencana Kerja di tahun berkenaan. Namun demikian, prioritas Renja juga akan menyesuaikan dengan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Perubahan Tahun 2019 – 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur. Rencana program serta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang ada pada DP3AK Provinsi Jawa Timur, ada Enam (6) Program dan Delapan Belas (18) kegiatan dengan Pagu Indikatif selama lima tahun sebesar **Rp. 196.662.062.052,94,- (Seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus enam puluh dua juta enam puluh dua ribu lima puluh dua rupiah Sembilan puluh empat sen).**

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.08.0100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor	Persen	100	100	2.810.398.500	2.732.221.334	Sekretariat	Surabaya
		1.08.0100.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	2.810.398.500	2.732.221.334		Surabaya
		1.08.0100.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Persen	100	100	4.120.084.500	3.796.765.611	Sekretariat	Surabaya
		1.08.0100.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang tersedia	Paket/Unit	100	108	2.691.684.500	2.564.063.934		Surabaya
		1.08.0100.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Sarana yang terpelihara	Paket/Unit	100	100	1.428.400.000	1.232.701.677		Surabaya
		1.08.0100.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	Persen	100	100	920.482.000	898.954.828	Sekretariat	Jawa Timur
		1.08.0100.07.001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	Kali	100	101	370.025.000	369.955.156		Jawa Timur
		1.08.0100.07.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	Orang	100	6	550.457.000	528.999.672		Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				Formal							
				Jumlah pegawai yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	115	101				
		1.08.0100.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	1.298.033.500	517.135.392	Sekretariat	Surabaya
		1.08.0100.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	6	6	435.620.000	435.550.140		Surabaya
		1.08.0100.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun	Dokumen	5	5	289.555.000	288.275.123		Surabaya
		1.08.0100.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah Update Database Perangkat Daerah	Paket	12	12	84.825.000	84.782.200		Surabaya
		1.08.0100.08.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran	Dokumen	1	1	488.033.500	487.842.026		Surabaya
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	93,51	90,91				
	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	73,04	73,04				
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	30	37,57				
		1.08.0100.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	Persen	15	16,7	1.445.000.000	1.395.090.203	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		1.08.0100.18.015	Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah pelaku usaha perempuan yang dibina	orang	160	160	815.243.000	784.920.008		Jawa Timur
		1.08.0100.18.016	Pembinaan tentang Keluarga TKW	Jumlah Keluarga TKW di Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan	orang	76	50	99.696.000	93.916.750		Jawa Timur
		1.08.0100.18.017	Pendayagunaan Peran Perempuan dalam Bidang Politik	Jumlah kader partai politik yang mengikuti pelatihan pengambilan keputusan	orang	30	75	305.045.000	295.721.155		Jawa Timur
				Jumlah kader partai politik yang mengikuti Orientasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Bidang Politik	orang	50	84				
				Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Peran Perempuan dalam Bidang Politik	orang	76	76				
		1.08.0100.18.018	Pendayagunaan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	Jumlah Peserta dari Desa/Kelurahan yang mewakili 18 Kab/Kota yang telah mengikuti Evaluasi P2WKSS untuk mengikuti Pembinaan P2WKSS	orang	0	0	225.016.000	220.532.290		Jawa Timur
				Persentase Organisasi kemasyarakatan (perempuan) yang aktif berpartisipasi dalam PP dan PA	Orang	50	45				
		1.08.0100.26	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Perundangan yang mendukung Pengarusutamaan	%	80	84	2.268.000.000	2.207.217.218	Bidang Pengarusutamaan Gender	Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				Gender (PUG)							
				Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Perundangan yang mendukung Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Persen	84	82				
		1.08.0100.26.001	Penguatan Sistem Pendataan Dinamika Gender	Jumlah buku Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang sudah dianalisis	buku	1	1	250.000.000	232.344.688		Jawa Timur
				Jumlah Buku Statistik Gender dan Profil Anak yang sudah diterbitkan	buku	1	1				
				Jumlah Publikasi Kegiatan yang diinput dalam website	kali	0	0				
		1.08.0100.26.004	Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Jumlah jejaring /lembaga yang mendukung PUHA	Jejaring/lembaga	63	63	938.000.000	905.140.672		Jawa Timur
		1.08.0100.26.007	Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Anak di Provinsi dan di 38 Kab/Kota	Persen	19	18,4	1.080.000.000	1.069.731.858		Jawa Timur
				Jumlah Peserta Sosialisasi Keluarga Bina Setara di Kab/Kota	orang	76	47				
				Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Kelembagaan PUG dan PUA	orang	295	248				
				Persentase Kab/Kota yang dipetakan Capaian Pelaksanaan PUG dan PUHA	Persen	100	100				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				Jumlah Peserta Evaluasi Pelaksanaan PUG dan PUHA Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Timur	orang	0	0				
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak			Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan dan Trafiking di Jawa Timur	Persen	25	32				
		1.08.0100.25	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Korban KDRT, Non KDRT dan Trafiking yang melapor dan dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	Persen	100	100	2.264.450.000	2.145.560.633	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jawa Timur
				Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab/Kota	2	2				
		1.08.0100.25.001	Pelaksanaan Gerakan Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak	Jumlah jejaring yang mengikuti sosialisasi, koordinasi dan advokasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak	orang	140	140	603.600.000	525.882.588		Jawa Timur
		1.08.0100.25.002	Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Validasi Data Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kab/Kota	38	38	486.750.000	453.883.060		Jawa Timur
				Jumlah Jejaring Lintas Sektor terkait pelayanan dan Kinerja P2TP2A	Jejaring	3	3				
		1.08.0100.25.003	Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah Forum Anak yang terbentuk di Kabupaten/Kota	Forum Anak	39	39	1.174.100.000	1.165.794.985		Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				Jumlah Forum Anak Kabupaten/Kota terlatih sebagai pelopor dan pelapor	Forum Anak	5	39				
	Meningkatnya pengendalian penduduk			Persentase Data Kependudukan yang Akurat	Persen	100	99,47				
				Cakupan KB Aktif	Persen	71	75,72				
		1.12.0100.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Profil Kependudukan Jawa Timur berdasar Elemen Data Kependudukan	Buku	1	1	2.890.735.000	2.862.758.811	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jawa Timur
				Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP-EI	Persen	95	99,47				
				Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran	Persen	90	89,08				
				Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akta Kematian	Persen	40	58,89				
		1.12.0100.15.030	Pengintegrasian Sistem Database Informasi Administrasi Kependudukan Terpadu (SIAK)	Jumlah Kab/Kota yang Data Kependudukannya telah dikonsolidasi oleh Pusat	Kab/Kota	38	38	400.000.000	395.277.001		Jawa Timur
				Jumlah Kab/Kota yang sudah mendapatkan Bimbingan Teknik ADB (Administrator Data Base) Peningkatan Pengolahan SIAK Pelayanan Excellent	Kab/Kota	38	38				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				Jumlah Buku Data Kependudukan per semester dan Buletin Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	Buku	3	3				
		1.12.0100.15.031	Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang sarana prasarannya sudah diinventarisir dan dilaporkan ke Pusat	Kab/Kota	38	38	400.000.000	396.740.301		Jawa Timur
Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai SOP Pelayanan Kependudukan sesuai standart yang sudah diinventarisir	Kab/Kota			38	38						
Jumlah OPD/Institusi yang memanfaatkan data kependudukan	OPD			10	6						
		1.12.0100.15.033	Penataan Administrasi Sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan Laporan Data Kependudukan sesuai standart dan tepat waktu	Kab/Kota	38	38	450.000.000	446.981.900		Jawa Timur
Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan Laporan Data Kependudukan Mikro sesuai standart dan tepat waktu	Kab/Kota			38	38						
Jumlah Kab/Kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran	Kab/Kota			38	38						
		1.12.0100.15.032	Pencatatan Administrasi Kependudukan (DAK)			0	0	1.640.735.000	1.623.759.609		Jawa Timur
		1.14.0100.26	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Kabupaten/Kota yang CPRnya lebih besar sama dengan 80%	Persen	44,7	99,64	1.281.250.500	1.273.775.248	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2019				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		1.14.0100.26.001	Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang sudah mengupayakan Ketahanan Keluarga	Persen	100	100	581.250.500	579.175.940		Jawa Timur
		1.14.0100.26.003	Pengendalian penduduk, Advokasi dan Informasi	Persentase Kabupaten/Kota yang sudah membentuk DWG	Persen	57,9	52,6	400.000.000	394.967.608		Jawa Timur
		1.14.0100.26.004	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduki	Persentase Kabupaten/Kota yang sudah diorientasi KIE KB Berbasis Masyarakat	Persen	89,47	100	300.000.000	299.631.700		Jawa Timur

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.08.0100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Indikator Program yang tercapai	Persen	100	100	2.810.398.500	2.732.221.334	Sekretariat	Surabaya
				Persentase realisasi anggaran	Persen	95,25	96,28				
				Indeks profesionalitas ASN	-	80	78				
		108.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	2.810.398.500	2.732.221.334		Surabaya
		108.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	14	14	4.120.084.500	3.796.765.611		Surabaya
		108.01.003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	15	15	2.691.684.500	2.564.063.934		Surabaya
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	70,57					
	Meningkatnya Komitmen Pembangunan Responsif Gender			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	47	37,29				
		108,26	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	Persentase kelembagaan daerah yang responsif gender	Persen	100	100	938.574.562	935.913.150	Bidang Kesetaraan Gender	Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		108.26.001	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah kegiatan PD Responsif Gender Provinsi Jawa Timur	Perangkat Daerah	82	65	485.835.000	484.823.650		Jawa Timur
				Jumlah kab/kota yang mempunyai peraturan PUG (Perda/perbup/wali)	Kab/Kota	30	38				
		108.26.002	Penguatan Pembangunan Responsif Gender di Semua Bidang	Jumlah PD yang melakukan kegiatan PPRG tematik	Perangkat Daerah	10	65	292.239.562	291.771.800		Jawa Timur
		108.26.003	Pengembangan Data Gender dan Anak	Jumlah Perangkat Daerah mempunyai Data Terpilah	Perangkat Daerah	20	20	160.500.000	159.317.700		Jawa Timur
				Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem pencatatan data terpilih gender dan anak	Kab/Kota	15	10				
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan Perlindungan Perempuan			Persentase Perempuan Pengambil Keputusan	Persen	15,1					
					Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	Persen	100	100			
		108,15	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan yg menjadi anggota partai politik	Persen	16	16,7	730.875.455	726.534.459	Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	Jawa Timur
				Rasio KDRT		52	60,41				
				Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		52,08	41,03				
		108.15.001	Pendayagunaan Peran Perempuan di Bidang Politik, Sosial, dan Budaya	Jumlah Peserta Kegiatan Peran Organisasi Perempuan Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera	Orang	0	0	283.893.001	281.729.929		Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Politik Bagi Perempuan Anggota Partai dan Organisasi Perempuan	Orang	75	85				
				Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Pedoman Pengembangan Sekolah Perempuan (Sekoper)	Orang	0	0				
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Peran Perempuan Dalam Bidang Politik	Orang		0				
		108.15.002	Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Jumlah Jejaring Lintas Sektor terkait Pelayanan dan Kinerja UPTD PPA/P2TP2A	Jejaring	3	3	165.912.854	164.181.930		Jawa Timur
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dari Bahaya Radikalisme		Orang	0	0					
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dari HIV/AIDS dan NAPZA		Orang	0	0					
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan FGD Pentingnya ASI Eksklusif bagi Kesehatan Perempuan dan Tumbuh Kembang Anak		Orang	0	0					
		108.15.003	Pendayagunaan Peran Perempuan di Bidang Ekonomi dan Lingkungan	Jumlah Pelaku Industri Rumahan yang Mengikuti Pelatihan ICT	Orang	200	150	281.069.600	280.622.600		Jawa Timur
		Jumlah Perempuan yang Mengikuti Bimbingan		Orang	0	0					
		Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Mengikuti FGD		Orang	40	50					
		Jumlah Keluarga Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibina		Orang	0	0					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				Jumlah Penyusunan dan Pemetaan Data Bidang PP	Kab/Kota	38	38				
	Meningkatnya Perlindungan Anak			Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan	Persen	100	100				
				Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	86,84					
		108,16	Program Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	Persentase Forum Anak yang Aktif di Kab/Kota	Persen	100	100	1.026.174.562	989.321.665	Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	Jawa Timur
		108.16.001	Penguatan Kelembagaan dan Jejaring PUHA	Jumlah kab/kota yang sudah mempunyai SK Gugus Tugas KLA dan RAD KLA	Kab/Kota	38	38	273.965.000	237.921.715		Jawa Timur
				Jumlah perangkat daerah provinsi yang mempunyai kegiatan terkait kegiatan KLA	Perangkat Daerah	19	20				
		108.16.002	Pelaksanaan Perlindungan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak	Orang	0	0	250.565.015	250.419.500		Jawa Timur
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Perlindungan anak tentang Pencegahan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba	Orang	0	0				
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Tumbuh Kembang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Orang	80	80				
		108.16.003	Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak	Cakupan Kab/Kota yang membentuk Forum Anak	Persen	100	100	501.644.547	500.980.450		Jawa Timur
				Persentase Forum Anak Kab/Kota yang terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor	Persen	100	100				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
	Meningkatnya pengendalian penduduk			Persentase Data Kependudukan yang Akurat	Persen	99,75	99,95				
				Cakupan KB Aktif	Persen	75,90	75,69				
		112,15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan e-KTP	Persen	100	99,95	1.295.305.637	1.290.203.072	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jawa Timur
				Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Akte Kelahiran	Persen	92	94,14				
				Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Akte Kematian	Persen	60	100				
		112.15.001	Penataan Administrasi Sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan Laporan Data Kependudukan sesuai standart dan tepat waktu	Kab/Kota	38	38	194.264.547	192.851.800		Jawa Timur
				Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan Laporan Data Kependudukan Mikro sesuai standart dan tepat waktu	Kab/Kota	38	38				
				Jumlah Kab/Kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran	Kab/Kota	38	38				
				Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kependudukan se Jawa Timur	Orang	90	90				
				Jumlah Laporan Pengolahan Data Kependudukan	Laporan	76	76				
				Jumlah Laporan Monev Pelaksanaan Percepatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Jawa Timur	Laporan	76	114				
				Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Peningkatan Layanan Pendaftaran	Orang	0	0				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				Penduduk se Jawa Timur							
		112.15.002	Pengintegrasian Sistem Database Informasi Administrasi Kependudukan Terpadu (SIAK)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Data Kependudukannya telah dikonsolidasikan oleh Pusat	Kab/Kota	38	38	141.052.090	141.036.750		Jawa Timur
				Jumlah Kab/Kota yang sudah mendapatkan Bimbingan Teknik ADB	Kab/Kota	0	0				
				Jumlah Buku Data Kependudukan per Semestr dan Buletin Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	Buku	0	0				
				Jumlah Majalah Buletin Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	Edisi	1	1				
				Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu di Jawa Timur	Orang	0	0				
				Jumlah pessenger yang mengikuti Rapat koordinasi Teknis Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Jawa Timur	Orang	0	0				
		112.15.003	Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai SOP Pelayanan Kependudukan sesuai standart yang sudah diinventarisir	Kab/Kota	38	38	229.400.000	227.608.819		Jawa Timur
				Jumlah OPD/Institusi yang memanfaatkan data kependudukan	Perangkat Daerah	3	3				
				Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan	Orang	0	0				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
				Jumlah laporan Monitoring Sinkronisasi kebijakan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan	Laporan	76	76				
				Jumlah laporan Satgas Supervisi Implementasi Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kependudukan di Jawa Timur	Laporan	152	152				
				Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Asistensi Penyusunan Anggaran Tahun 2021 Kabupaten/Kota Penyelarasan Program Administrasi kependudukan se Jawa Timur	Orang	0	0				
				Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Penyelarasan Program Administrasi Kependudukan	Orang	0	0				
		112.15.004	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kab/Kota	38	38	730.589.000	728705703		Jawa Timur
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	38	38				
				Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP el	Orang	38	38				
				Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Orang	38	38				
				Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Orang	38	38				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2020				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						KINERJA		ANGGARAN			
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		114,19	Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang CPRnya lebih besar sama dengan 80%	Persen	50,00	7,89	643.924.547	643.439.950	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga	Jawa Timur
		114.19.001	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduki	Jumlah Peserta yang mengikuti Orientasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di Pondok Pesantren di 10 Kab/Kota	Orang	200	200	221.924.547	221.639.300		Jawa Timur
				Jumlah peserta yang diberikan pembinaan evaluasi dan sinkronisasi program KKBPK di 38 Kab/Kota	Orang	0	0				
				Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi KIE-KB Berbasis Masyarakat di 38 Kab/Kota	Orang	0	0				
				Aplikasi Data KKBPK	Paket	1	1				
		114.19.002	Ketahanan Keluarga	Persentase Kab/Kota yang BKB dan BKR nya telah terintegrasi dengan Perlindungan Anak	Persen	0	0	245.000.000	244.900.550		Jawa Timur
				Persentase Kab/Kota yang BKL nya sudah dibina dalam rangka Ketahanan Keluarga	Persen	0	0				
				Jumlah Orang yang mengikuti Antisipasi Baby Boom pada Pandemi Covid 19 di 38 Kab/Kota	Orang	119	119				
		114.19.003	Pengendalian Penduduk	Persentase Kabupaten/Kota yang sudah membentuk DWG	Persen	47,36	55,26	177.000.000	176.900.100		Jawa Timur

TABEL 6.3
Program dan Kegiatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					30.680.717.485		27.852.482.000,00		28.423.889.000,00		28.828.582.000,00				
		2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	100	100	21.109.241.925	100	22.436.482.000,00	100	23.007.889.000,00	100	23.412.582.000,00	100	89.966.194.925	Sekretariat	Jawa Timur
				Persentase realisasi anggaran	Persen	96,28	95,6		95,75		95,9		96,15		96,15			
				Indeks profesionalitas ASN	-	81,93	81		81,05		81,15		81,30		81,30			
		2.08.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah		7	7	491.410.115	9	638.824.000,00	9	689.141.000,00	8	718.677.000,00	33	2.538.052.115	Sub Bag Sungram	
		2.08.02.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	11	343.847.000	7	404.306.030,00	7	429.623.030,00	7	444.623.030,00	32	1.622.399.090		
		2.08.02.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1	1	7.960.000	1	17.988.000	1	17.988.000	1	17.988.000	4	61.924.000		
		2.08.02.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1	1	7.960.000	1	16.234.000	1	16.234.000	1	16.234.000	4	56.662.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.08.02.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	1	7.960.000	1	12.488.000	1	12.488.000	1	12.488.000	4	45.424.000		
		2.08.02.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	1	10.193.115	1	14.240.000	1	14.240.000	1	14.240.000	4	52.913.115		
		2.08.02.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Dokumen	4	4	98.012.000	4	129.221.970	4	129.221.970	4	129.221.970	16	485.677.910		
		2.08.02.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	4	4	15.478.000	4	44.346.000	4	69.346.000	4	83.882.000	16	213.052.000		
		2.08.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	4	4	18.264.049.760	12	19.022.658.000	12	19.343.748.000	12	19.643.905.000	40	76.274.360.760	Sub Bag Keuangan	
		2.08.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	12	12	17.393.980.000	12	18.072.658.000	12	18.343.748.000	12	18.618.905.000	48	72.429.291.000		
		2.08.01.102.02	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	12	557.328.000	12	538.368.000	12	538.368.000	12	538.368.000	48	2.172.432.000		
		2.08.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	12	12	191.142.550	12	289.471.509	12	339.471.509	12	364.471.509	48	1.184.557.077		
		2.08.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi Perangkat Daerah	Laporan	12	12	52.940.000	12	50.240.000	12	50.240.000	12	50.240.000	48	203.660.000		
		2.08.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	9.780.000	2	9.401.545	2	9.401.545	2	9.401.545	8	37.984.635		
		2.08.01.102.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	Dokumen	1	1	5.260.000	1	25.185.910	1	25.185.910	1	25.185.910	4	80.817.730		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.08.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	12	12	48.609.210	12	29.147.615	12	29.147.615	12	29.147.615	48	136.052.055		
		2.08.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Laporan	1	1	5.010.000	1	8.185.421	1	8.185.421	1	8.185.421	4	29.566.263		
		2.08.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	15	15	322.593.000	12	430.000.000	12	430.000.000	12	455.000.000	51	1.637.593.000	Sub Bag Tata Usaha	
		2.08.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket/LS	1	1	47.300.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	82.500.000	4	289.800.000		
		2.08.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data pegawai	Laporan	12	12	72.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	87.500.000	48	329.500.000		
		2.08.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	Laporan	12	12	193.693.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	270.000.000	48	963.693.000		
		2.08.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1	1	9.600.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	54.600.000		
		2.08.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan			690.245.156	11	590.000.000	11	590.000.000	11	615.000.000	33	2.485.245.156	Sub Bag Tata Usaha	
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	15	15		-		-		-		15			
		2.08.01.	Penyediaan	Jumlah paket	Paket/ LS	1	1	19.997.84	1		1		1		4			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		106.01	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	pengadaan				2		20.000.000		20.000.000		20.000.000		79.997.842		
		2.08.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket/LS	12	12	203.883.656	1	205.000.000	1	205.000.000	1	230.000.000	15	843.883.656		
		2.08.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	Paket/LS	1	1	1.331.416	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	7.331.416		
		2.08.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket/LS	1	1	112.653.480	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	4	457.653.480		
		2.08.01.106.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket pengadaan	paket/LS	1	1	6.060.696	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	66.060.696		
		2.08.01.106.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	paket/LS	1	1	4.686.066	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	4	28.686.066		
		2.08.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Laporan	4	4	341.632.000	4	220.000.000	4	220.000.000	4	220.000.000	16	1.001.632.000		
		2.08.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.036.954.394	12	1.090.000.000	12	1.110.000.000	12	1.135.000.000	36	4.371.954.394	Sub Bag Tata Usaha	
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	15	15		-		-		-		15			
		2.08.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	490.187.532	12	540.000.000	12	560.000.000	12	560.000.000	48	2.150.187.532		
		2.08.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket/LS	1	1	546.766.862	1	550.000.000	1	550.000.000	1	575.000.000	4	2.221.766.862		
		2.08.01	Pemeliharaan	Jumlah laporan	Laporan			291.489.	12		12		12		36		Sub Bag	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		.109	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	aset tetap yang terpelihara				500		650.000.000		830.000.000		830.000.000		2.601.489.500	Tata Usaha	
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	15	15		-		-		-		15			
		2.08.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket/LS	1	1	138.997.000	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	4	648.997.000		
		2.08.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Paket/LS	1	1	51.555.800	1	100.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	4	501.555.800		
		2.08.01.109.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Paket/LS	1	1	5.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	305.000.000		
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket/LS	1	1	80.312.500	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	680.312.500		
		X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket/LS	1	1	15.624.200	1	100.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	4	465.624.200		
		2.08.01.113	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Produk Kehumasan yang	Persen	0	0	12.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	57.500.000	Sub Bag Tata Usaha	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				terverifikasi														
				Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	15	15	-	-	-	-	-	-	15				
		2.08.01.113.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah hasil olah konten dokumentasi Kegiatan Kepala Dinas	Paket	1	1	12.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	57.500.000		
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender	Persen	33		4.100.712.920	66	2.614.750.000	79	2.614.750.000	92	2.614.750.000	92	11.944.962.920	Bidang KG	
				Persentase ARG Jawa Timur	Persen	37,29			45		50		55		55			
				Persentase Capaian Kinerja PUG	Persen		68								68			
				Persentase Kab/Kota yang melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan	Persen		-		100		100		100		100		Bidang P3	
				Persentase perempuan yang menjadi anggota partai politik	Persen		16		-		-		-		16			
				Partisipasi	Persen		52,1		-		-		-		52,1			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				angkatan kerja perempuan														
		2.08.02 .1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Peraturan Perundangan PUG (Perda/Perbup/Wali)	Kab/Kota	13		1.402.707.280	25	1.174.750.000	30	1.174.750.000	35	1.174.750.000	35	4.926.957.280	Bidang KG	
				Jumlah Dokumen PPRG yang telah diverifikasi	dokumen	57			61		62		63		63			
				Persentase kelembagaan PUG			35		-		-		-		35			
		2.08.02. 1.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan PUG Prov yang telah dihasilkan	PD Prov	10	20	645.564.192	25	564.138.000	30	564.138.000	35	564.138.000	35	2.337.978.192	Bidang KG	
				Jumlah kebijakan Kab/Kota yang telah dihasilkan	Kab/Kota	20	23		26		29		32		32			
				Jumlah fasilitasi pertemuan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG PD Provinsi dan Kab/Kota	Kegiatan		4		-		-		-		4			
		2.08.02. 1.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi sinkronisasi pelaksanaan PUG Prov	Laporan	40		296.750.088	55	183.370.000	60	183.370.000	65	183.370.000	65	846.860.088	Bidang KG	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi sinkronisasi pelaksanaan PUG Kab/Kota	Laporan	30			35		37		38		38			
				Jumlah fasilitas Pertemuan dalam Rangka Pelaksanaan PUG PD Provinsi dan Kab/Kota	Kegiatan		3	-		-		-		-	3			
		2.08.02.1.01.03	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan Provinsi	Jumlah PD yang mendapatkan pendampingan	PD Prov	65		182.549.000	65	360.934.000	65	360.934.000	65	360.934.000	65	1.265.351.000	Bidang KG	
				Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan	Kab/Kota	38			38		38		38		38			
				Jumlah pertemuan advokasi pelaksanaan PUG kepada pengambil keputusan pemerintahan dan lembaga diluar pemerintahan	Kegiatan		5	-		-		-		-	5			
		2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga non pemerintahan yang mendapat sosialisasi pelaksanaan PUG	Lembaga	25	-	277.844.000	26	66.308.000	28	66.308.000	30	66.308.000	32	476.768.000	Bidang KG	
				Jumlah pertemuan dalam rangka sosialisasi dan pendampingan PPRG Tim	Kegiatan	10	2		22		27		32		35			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penggerak PUG Kab/Kota se Jatim, Auditor, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media														
		2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang menjadi anggota parlemen	Orang		-	2.593.695.640	38	1.390.000.000	38	1.390.000.000	38	1.390.000.000	114	6.763.695.640	Bidang P3	
				Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional	Orang		-		38		38		38		114			
				Jumlah perempuan yang memberikan kontribusi pendapatan keluarga	orang		-		500		500		500		1500			
				Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	Orang		50		-		-		-		50			
				Jumlah kader politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan	Orang		100		-		-		-		100			
		2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan	Orang		-	1.079.469.016	100	300.000.000	120	300.000.000	120	300.000.000	340	1.979.469.016	Bidang P3	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	partisipasi perempuan dalam bidang politik, sosial, dan budaya														
				Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan lingkungan	orang		-		90		90		90		270			
				Jumlah kader politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan	Orang		80		-		-		-		80			
				Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	Orang		50		-		-		-		50			
				Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi	Orang		81		-		-		-		81			
				Jumlah peserta kegiatan pengembangan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dikembangkan	Peserta		87		-		-		-		87			
		2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan	Jumlah Advokasi Kebijakan dan	Kali		-	1.514.226.624	1	1.090.000.000	1	1.090.000.000	1	1.090.000.000	3	4.784.226.624	Bidang P3	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi														
				Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan kebijakan dalam politik hukum sosial budaya	Kab/Kota		-		38		38		38		114			
				Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan partisipasi perempuan bidang politik, sosial dan budaya	Orang		-		100		100		100		300			
				Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan kebijakan dalam ekonomi dan lingkungan	Kab/Kota		-		38		38		38		114			
				Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan partisipasi perempuan bidang ekonomi dan lingkungan	Orang		-		500		500		500		1500			
				Jumlah senat mahasiswa perempuan yang memahami peran perempuan di bidang politik	Orang		75		-		-		-		75			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan SDM bagi anggota forum puspa Kab/Kota	Orang		75		-		-		-		75			
				Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi	Orang		100		-		-		-		100			
				Jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan peningkatan partisipasi perempuan bidang ekonomi dan lingkungan	Orang		100		-		-		-		100			
				Jumlah aplikasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dikembangkan	Paket		1		-		-		-		1			
		2.08.02 .1.03	Penguatan & pengembangan penyedia layanan pemberdayaan perempuan keeweangan provinsi	Jumlah penguatan dan pengembangan penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Orang		-	104.310.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	300	254.310.000	Bidang P3	
				Jumlah Kader Politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan	Orang		100		-		-		-		100			
				Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas	Orang		50		-		-		-		50			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera														
		2.08.02. 1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah PD dan Kab/Kota yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	PD dan Kab/Kota		-	104.310.000	38	50.000.000	38	50.000.000	38	50.000.000	114	254.310.000	Bidang P3	
				Jumlah Brosur/leaflet/buku /banner Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Buah		-		100		100		100		300			
				Jumlah Dokumen Juknis PUSPA	Buku		100		-		-		-		100			
				Brosur/leaflet tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Lembar		450		-		-		-		450			
				Jumlah Dokumen Buku Panduan SEKOPER	Buku		130		-		-		-		130			
				Buku saku Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Buku		950		-		-		-		950			
				Buku Kumpulan Peraturan tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Buku		106		-		-		-		106			
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan	Kebijakan		-	1.994.205.500	1	487.000.000	1	487.000.000	1	487.000.000		1.767.225.000	Bidang P3	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan perempuan														
				Rasio KDRT	Persen		47		-		-		-		47			
		2.08.03 .1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan para pihak penyedia layanan	Dokumen	0	0	427.225.000	1	280.000.000	1	280.000.000	1	280.000.000	9	1.267.225.000	Bidang P3	
				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen		100		-		-		-		100			
		2.08.03. 1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan dan TPPO terhadap perempuan	orang	0	-	327.225.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	300	717.225.000	Bidang P3	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				jumlah peserta kegiatan mekanisme pelaporan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	Orang		160		-		-		-					
		2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Advokasi kebijakan layanan perlindungan perempuan	Orang	0	-	100.000.000	86	150.000.000	86	150.000.000	86	150.000.000	258	550.000.000	Bidang P3	
				Jumlah dokumen kebijakan	Dokumen		1		-		-		-		1			
		2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang tertangani	Orang		0	1.334.280.500	0	0	85	0	85	0	85	1.334.280.500	Bidang P3	
		2.08.03.1.02.01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Orang		100	1.105.875.000	0	0	0	0	0	0	0	1.105.875.000	Hibah PPT Bhayangkara	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Kali		100	228.405.500	0	0	0	0	0	0	12		Bidang P3	
		2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	Lembaga	15	-	232.700.000	15	207.000.000	15	207.000.000	15	207.000.000	18	500.000.000	Bidang P3	
				Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan			-		10		10		10		10		Bidang P3	
				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh petugas terlatih di dalam unit	Persen		100		-		-		-		100		Bidang P3	
		2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah PD/Kab/Kota yang mempunyai sarana prasarana layanan perempuan korban kekerasan yang sesuai dengan SOP			-	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1		Bidang P3	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM Penyedia Layanan			-	32.700.000	20	32.000.000	20	32.000.000	20	32.000.000	20		Bidang P3	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang		100											
		2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kebutuhan spesifik yang tercukupi bagi perempuan			-	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10		Bidang P3	
				Jumlah pelatihan spesifik perempuan yang terlaksana			-		2		2		2		2			
		2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring penyedia layanan perlindungan perempuan	Orang		-	200.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	45	500.000.000	Bidang P3	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang	Orang		80		-		-		-		80		Bidang P3	
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kebijakan kualitas keluarga yang dikeluarkan	Persen	0	-	108.629.000	20%	125.250.000	30%	125.250.000	40%	125.250.000	30%	310.000.000	Bidang KG	
				Capaian indikator kualitas keluarga			50		-		-		-		50			
		2.08.04.1.01	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabkota yang mempunyai kebijakan kualitas keluarga	Kabkota	0	-	108.629.000	4	125.250.000	6	125.250.000	8	125.250.000	8	310.000.000	Bidang KG	
				Jumlah PD yang melakukan kegiatan PPRG tematik	PD		15								15			
		2.08.04.1.01.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	Kab/Kota	0	0	0	38	0	38	0	38	0	38	120.000.000	Bidang KG	
		2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi ,	Jumlah peserta sosialisasi KIE, KG,	Orang	0	-	108.629.000	150	125.250.000	175	125.250.000	200	125.250.000	200	130.000.000	Bidang KG	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Informasing, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	dan PA														
				Jumlah media sosialisasi yang digunakan untuk KIE KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga	Buah	0	-		4		6		8		10			
				Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi terkait Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dalam Keluarga	Kab/Kota		38		-		-		-		38			
		2.08.04.1.01.03	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	Jumlah kebijakan pengembangan kesmas yang dihasilkan	dokumen		-	0	1	0	2	0	3	0	3	60.000.000	Bidang KG	
		2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase PD yang memanfaatkan data gender dan anak	% PD Prov	20		606.804.000	35	320.000.000	40	320.000.000	50	320.000.000	50	1.566.804.000	Bidang KG	
				Persentase kelembagaan daerah yang responsif gender	Persen	100	80		-		-		-		80			
		2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan	Jumlah OPD yang memasukkan Data Gender dan Anak dalam	OPD	35	-	606.804.000	45	320.000.000	50	320.000.000	60	320.000.000	60	1.566.804.000	Bidang KG	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Aplikasi SIGA														
				Jumlah Perangkat Daerah mempunyai Data Terpilah	PD	20	25	-	-	-	-	-	-	25				
				Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem pencatatan data terpilah gender dan anak	Kab/Kota	10	20	-	-	-	-	-	-	10				
		2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah PD yang memiliki data terpilah gender dan anak	PD Prov	20	25	137.844.000	35	192.214.000	45	192.214.000	50	192.214.000	50	714.486.000	Bidang KG	
		2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data Provinsi	Jumlah buku yang dihasilkan	buku	3	-	468.960.000	3	127.786.000	3	127.786.000	3	127.786.000	16	852.318.000	Bidang KG	
				Jumlah Indikator Data Gender dan Anak yang terisi	PD Provinsi dan Kab/Kota		20	-	-	-	-	-	-	20				
	Meningkatnya Perlindungan Anak	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persen		-	1.662.588.709	100,00	1.180.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	100	5.202.588.709	Bidang PTKA	
				Persentase Forum Anak yang aktif di Kab/Kota	Persen	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100				
		2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada	Jumlah Lembaga	Lembaga		-	858.167.412	4	590.000.000	4	590.000.000	4	590.000.000	4	2.628.167.412	Bidang PTKA	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang melaksanakan PHA														
				Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai SK Gugus Tugas KLA dan RAD KLA	Kab/Kota	38	38	-		-		-			38			
				Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai kegiatan terkait kegiatan KLA	PD	20	7	-		-		-			20			
		2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan pendampingan PHA	Lembaga		- 649.515.524	4	392.000.000	4	392.000.000	4	392.000.000	4	1.825.515.524	Bidang PTKA		
				Jumlah fasilitasi kegiatan pada Kluster III dan IV	Kab/Kota		38	-		-		-			38			
		2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA	Orang		- 208.651.888	76	198.000.000	76	198.000.000	76	198.000.000	228	802.651.888	Bidang PTKA		
				Jumlah Kabupaten/Kota	Kab/Kota		38	-		-		-			38			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				yang didampingi pada Penilaian Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA														
				Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Pendampingan Persiapan Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA Kabupaten/Kota	Orang		80		-		-		-		80			
				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi	Orang		108		-		-		-		108			
		2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga/jejarin g yang mendorong Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen		-	804.421.297	100	590.000.000	100	590.000.000	100	590.000.000	100	2.574.421.297	Bidang PTKA	
				Cakupan Kab/Kota yang membentuk Forum Anak	Kab/Kota		85,00		-		-		-		85			
		2.08.06.1.02.01	Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Orang		-	366.590.363	76	330.000.000	76	330.000.000	76	330.000.000	228	1.356.590.363	Bidang PTKA	
				Jumlah Peserta Peringatan Hari Anak nasional	Orang		76		-		-		-		76			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021														
		2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah peserta yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak	PD		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang PTKA	
		2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah peserta Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Orang		-	437.830.934	76	260.000.000	76	260.000.000	76	260.000.000	228	1.217.830.934	Bidang PTKA	
				Jumlah media sosialisasi yang digunakan dalam Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Buah		-		3		3		3		9	0		
				Jumlah peserta pertemuan Forum Anak Daerah se Jawa Timur	orang		88		-		-		-		88			
				Jumlah peserta Bimtek Pelatihan fasilitator Anak Kabupaten/Kota se Jawa Timur	orang		88		-		-		-		88			
		2.08.06.1.02.04	Penguatan jejaring antar lembaga	Jumlah lembaga / jejaring yang	Lembaga		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang PTKA	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	aktif/terdaftar														
		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan anak	Dokumen		-	1.098.535.431	1	689.000.000	1	689.000.000	1	689.000.000	1	3.165.535.431	Bidang PTKA	
				Persentase Forum Anak yang aktif di Kab/Kota	Persen	100	85		-		-		-		85			
		2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang berpartisipasi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	PD Provinsi dan Kab/Kota		0	500.953.931	58	590.000.000	58	590.000.000	58	590.000.000	58	2.270.953.931	Bidang PTKA	
				Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan oleh Petugas terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen		100		-		-		-		100			
		2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi	Orang		0	272.241.931	76	475.000.000	76	475.000.000	76	475.000.000	228	1.697.241.931	Bidang PTKA	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	pencegahan kekerasan terhadap anak														
				Jumlah kab/kota yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan kebijakan terkait Pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab/Kota		-		38		38		38		38			
				Jumlah peserta Advokasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Orang		76		-		-		-		76			
				Jumlah Peserta Advokasi Sistem Perlindungan Anak	Orang		49		-		-		-		49			
		2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Orang		0	228.712.000	76	115.000.000	76	115.000.000	76	115.000.000	228	573.712.000	Bidang PTKA	
				Jumlah peserta rapat pembahasan petunjuk teknis perlindungan anak	orang		17		-		-		-		17			
				Jumlah peserta penguatan kapasitas jejaring perlindungan anak	orang		51		-		-		-		51			
		2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang	Persentase Jenis Layanan yang Tersedia	Persen		-	543.876.500	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	600.116.000	Bidang PTKA	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi															
		2.08.07. 1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan	Orang		0	228.405.500	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	Bidang PTKA	
		2.08.07. 1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Jumlah peserta sosialisasi terkait KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus	Orang		0	315.471.000	38	34.000.000	38	34.000.000	38	34.000.000	38	450.116.000	Bidang PTKA	
		2.08.07 .1.03	Penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang berpartisipasi untuk perlindungan khusus anak	Persen		-	53.705.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	792.526.000	Bidang PTKA	
				Persentase penanganan kasus kekerasan			100		-		-		-		100			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				perempuan dan anak														
		2.08.07.1.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Jumlah sarpras yang sudah tersedia (UPT PPA Provinsi)	Buah		0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	12	30.000.000	Bidang PTKA	
				Jumlah sarpras Kab/Kota yang sudah terdata	Buah		0		5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	45	30.000.000		
		2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan anak yg memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM	Orang		-	53.705.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	75	75.000.000	Bidang PTKA	
		2.08.07.1.03.03	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yg memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Jumlah jejaring penyedia layanan anak yang aktif	Jejaring		-	0	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	657.526.000	Bidang PTKA	
				Jumlah kasus kekerasan anak	Kasus		100		-		-		-		100			
			URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKA					3.406.595.780		1.440.000.000		1.440.000.000		1.440.000.000				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			N DAN PENCATATAN SIPIIL															
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	Persen	98	100	977.600.991	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	2.507.600.991	Bidang Admindukcapil	
				Persentase Kartu Identitas Anak(KIA)	Persen	24	40		60		70		80		80			
		2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan pendaftaran kependudukan sesuai standar	Persen	100	-	521.268.491	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	1.841.268.491	Bidang Admindukcapil	
				Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan Laporan Data Kependudukan sesuai standar dan tepat waktu	Kab/Kota	38	38		-		-		-		38			
				Jumlah kab/kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran	Kab/Kota	38	38		-		-		-		38			
		2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional	Kab./Kota	38	-	100.251.310	38	100.000.000	38	100.000.000	38	100.000.000	38	400.251.310	Bidang Admindukcapil	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah kab/kota yang mengikuti peningkatan SDM kebijakan pelaksanaan penataan sistim administrasi kependudukan	Kab/Kota	38	38		38		38		38		38			
		2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Kab./Kota yang telah melaksanakan SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab./Kota	38	-	304.197.181	38	260.000.000	38	260.000.000	38	260.000.000	38	1.084.197.181	Bidang Adminduk kcapil	
				Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan layanan Pendaftaran Penduduk se Jawa Timur	Kab/Kota	38	38		38		38		38		38			
		2.12.02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Pendaftaran Penduduk di Jawa Timur	Kab./Kota	38	38	116.820.000	38	80.000.000	38	80.000.000	38	80.000.000	38	356.820.000	Bidang Adminduk kcapil	
		2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang telah menyelenggarakan pendaftaran kependudukan sesuai standar	Persen	100	-	456.332.500	100	0	100	0	100	0	100	456.332.500	Bidang Adminduk kcapil	
				Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP	Persen	100	100		-		-		-		100			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.12.02.1.02.01	Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk (DAK NF Dana Yanminduk)	Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	Kab./Kota	38	38	265.215.000	-	0	-	0	-	0	38	265.215.000	Bidang Admindu kcapil	
		2.12.02.1.02.02	Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk (DAK NF Dana Yanminduk)	Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Kab./Kota	38	38	191.117.500	-	0	-	0	-	0	38	191.117.500	Bidang Admindu kcapil	
		2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk sesuai standar	Kab./Kota	38	-	0	38	70.000.000	38	70.000.000	38	70.000.000	38	210.000.000	Bidang Admindu kcapil	
				Jumlah kab/kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran	Kab/Kota	38	38		-		-		-		38			
		2.12.02.1.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Kab./Kota yang telah melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab./Kota	38	-	0	38	0	38	0	38	0	38	0	Bidang Admindu kcapil	
		2.12.02.1.03.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk	Kab./Kota	38	-	0	38	70.000.000	38	70.000.000	38	70.000.000	38	210.000.000	Bidang Admindu kcapil	
				Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM Pelaksanaan Bidang Pendaftaran Penduduk	Kab/Kota	38	38		38		38		38		38			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.12.03	Program Pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	92	94	851.907.500	96	0	98	0	100	0	100	851.907.500	Bidang Admindukcapil	
				Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100	-		100		100		100		100	0		
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	-		100		100		100		100	0		
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Persen	100	-		100		100		100		100	0		
		2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan pencatatan Sipil sesuai standar	Persen	100	100	213.370.000	100	0	100	0	100	0	100	213.370.000	Bidang Admindukcapil	
		2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil berdasarkan	Kab./Kota	38	-		38	0	38	0	38	0	38	0	Bidang Admindukcapil	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				kebijakan nasional														
		2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Kab./Kota yang telah melaksanakan SOP Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab./Kota	38	38	0	0	0	0	0	0	0	38	0	Bidang Admindu kcapil	
		2.12.03.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil (DAK NF Dana Yanminduk)	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Pencatatan Sipil di Jawa Timur	Kab./Kota	38	38	213.370.000	0	0	0	0	0	0	38	213.370.000	Bidang Admindu kcapil	
		2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan Pelayanan pencatatan Sipil penduduk sesuai standar	Persen	100	-	638.537.500	100	0	100	0	100	0	100	638.537.500	Bidang Admindu kcapil	
				Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP	Persen	100	100		-		-		-		100			
		2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil (DAK NF Dana Yanminduk)	Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kab./Kota	0	-	132.150.000	38	0	38	0	38	0	38	132.150.000	Bidang Admindu kcapil	
				Pembinaan, Fasilitasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknik, Advokasi, supervisi dan Konsultasi Pencatatan Sipil Kab/Kota	Kab/Kota	38	38		-		-		-		38			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil (DAK NF Dana Yanmindak)	Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab./Kota	0	-	506.387.500	0	0	0	0	0	0	0	506.387.500	Bidang Admindukcapil	
				Peningkatan SDM Petugas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil Kab/Kota	Kab/Kota	38	38	-	-	-	-	-	-	-	38			
		2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab/Kota	100	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Bidang Admindukcapil	
		2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan Pencatatan Sipil Penduduk sesuai standar	Kab./Kota	38	-	0	38	0	38	0	38	0	38	0	Bidang Admindukcapil	
		2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil (DAK NF Dana Yanmindak)	Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Bimtek terkait Pencatatan Sipil	Kab./Kota	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Admindukcapil	
		2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)	Buku DKB	2	2	1.156.457.734	2	510.000.000	2	510.000.000	2	510.000.000	2	2.686.457.734	Bidang Admindukcapil	
		2.12.04.1.01	Penataan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang Pelayanan Adminduknya terkonsolidasi dan terintegrasi Big Database berbasis Penunggalan NIK sesuai Standar	Kab./Kota	38	38	246.844.542	38	140.000.000	38	140.000.000	38	140.000.000	38	666.844.542	Bidang Admindukcapil	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.12.04.1.01.01	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah peserta peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu di Jawa Timur	Orang	38	-	112.424.542	38	70.000.000	38	70.000.000	38	70.000.000	38	322.424.542	Bidang Adminduk kcapil	
				Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu di Jawa Timur	Kab/Kota	38	38											
		2.12.04.1.01.02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat Data Perseorangan, data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota (DAK NF Dana Yanminduk)	Jumlah peserta Pembinaan SDM penyusunan SOP, program kerja, monitoring, evaluasi dan Pengelolaan Data Kependudukan Kab./Kota	Orang	38	-	134.420.000	38	70.000.000	38	70.000.000	38	70.000.000	38	344.420.000	Bidang Adminduk kcapil	
		2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tersedianya Database Perorangan yang dapat dimanfaatkan OPD/Lembaga Masyarakat berbadan	-	Database	-	606.099.270	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	906.099.270	Bidang Adminduk kcapil	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				hukum yang telah mendapat Hak Akses pemanfaatan Data Kependudukan														
				Jumlah Kab/Kota yang sudah mendapatkan Bimbingan Teknik ADB	Kab/Kota	38	38	-	-	-	-	-	-	-	38			
				Jumlah buku data kependudukan per semester dan buletik kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	Buku	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2			
		2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi Administrasi kependudukan (2021 DAK NF Dana Yanminduk)	Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab./Kota	38	38	216.350.000	0	0	0	0	0	0	38	216.350.000	Bidang Admindukcapil	
		2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi Administrasi kependudukan (2021 DAK NF Dana Yanminduk)	Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab./Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	Bidang Admindukcapil	
		2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat (2021 DAK)	Jumlah buku data kependudukan per semester dan buletin kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	Buku	2	-	305.058.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	395.058.000	Bidang Admindukcapil	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan	Edisi	2	2		-		-		-		2			
		2.12.04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah kewenangan Provinsi	Jumlah OPD, Lembaga pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang memanfaatkan Data Kependudukan	OPD/Lembaga	7	4	84.691.270	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	16	294.691.270	Bidang Admindukcapil	
		2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Data Kependudukan dgn OPD, Lembaga dan Lembaga Non Pemerintah	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Admindukcapil	
		2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Pelayanan Kependudukan yg telah terkonsolidasi dgn BIG Data	Kali	38	38	303.513.922	38	270.000.000	38	270.000.000	38	270.000.000	38	1.113.513.922	Bidang Admindukcapil	
		2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan SIAK dan Data Kependudukan yang telah terkonsolidasi oleh pusat	Kab./Kota	38	-	303.513.922	38	270.000.000	38	270.000.000	38	270.000.000	38	1.113.513.922	Bidang Admindukcapil	
				Jumlah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Kependudukan	Laporan	152	152		-		-		-		152			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				yang telah terkonsolidasi oleh Pusat														
		2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah peserta Peningkatan SDM Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan kab./kota	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Admindukcapil	
		2.12.05	Program Pengelolaan profil Kependudukan	Jumlah lembaga yg PKS dan memanfaatkan data profil kependudukan Jatim	PKS	7	5	420.629.555	5	420.000.000	5	420.000.000	5	420.000.000	27	1.680.629.555	Bidang Admindukcapil	
		2.12.05.1.01	Penyediaan profil Kependudukan	Profil Kependudukan Prov. Jatim yg valid dan update	buku	1	1	420.629.555	1	420.000.000	1	420.000.000	1	420.000.000	3	1.680.629.555	Bidang Admindukcapil	
		2.12.05.1.01.01	Penyediaan data kependudukan provinsi	Jumlah data registrasi dari Kab/Kota	Data	38	38	206.054.710	38	170.000.000	38	170.000.000	38	170.000.000	38	716.054.710	Bidang Admindukcapil	
				Jumlah peserta peningkatan SDM dalam rangka Pengembangan Penyelarasan Program Administrasi Kependudukan se Jawa Timur	Orang	0	130		38		38		38		38			
		2.12.05.1.01.02	Penyusunan profil Data perkembangan dan proyeksi Kependudukan	Jumlah Profil Perkembangan Kependudukan yang telah disusun	Buku	1	1	214.574.845	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	964.574.845	Bidang Admindukcapil	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Serta kebutuhan yang lain															
				Jumlah Profil yang telah diinventarisir dari Kab/Kota	Buku	38	38		38		38		38					
			URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					1.441.959.735		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000				
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan 5 pilar dalam GDPK	Persen		-	642.020.000	20	639.105.000	32	639.105.000	47	639.105.000	47	2.559.335.000	Bidang PPKB dan KK	
				Persentase Kab/Kota yang sudah Melaksanakan Program Pengendalian Penduduk	Persen		100		-		-		-		100			
		2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun 5 Pilar dalam GDPK	Kab/Kota			642.020.000	8	639.105.000	12	639.105.000	18	639.105.000	18	2.559.335.000	Bidang PPKB dan KK	
				Jumlah Kab/Kota yang sudah Mengikuti Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi	Kab/Kota		38		-		-		-		38			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.14.02. 1.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah peserta yang mengikuti Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Orang		-	113.420.0 00	114	279.520.000	114	279.520.000	114	279.520.000	#VA LUE!	951.980.000	Bidang PPKB dan KK	
				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Peningkatan peran serta mitra kerja dalam pengembangan Program KKBPK	orang		30		-		-		-		30			
				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan peran serta mitra kerja dalam pengembangan program KKBPK	Orang		120		-		-		-		120			
		2.14.02. 1.01.03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Kab/Kota		-	528.600.0 00	38	359.585.000	38	359.585.000	38	359.585.000	38	1.607.355.000	Bidang PPKB dan KK	
				Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Orang		50		-		-		-		50			
				Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi tentang Sekolah Siaga	Orang		50		-		-		-		50			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Kependudukan (SSK)														
		2.14.02.1.01.07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Orang		0	0	114	0	114	0	114	0	342	0	Bidang PPKB dan KK	
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase jumlah kesertaan KB aktif (CPR)			-	302.303.245	66,08	310.895.000	66,50	310.895.000	67,04	310.895.000	67,04	1.234.988.245	Bidang PPKB dan KK	
				Persentase Kab/Kota yang CPR nya lebih besar sama dengan 80 %	Persen		50		-		-		-		50			
		2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan desain program berbasis kearifan lokal	Kab/Kota		-	302.303.245	38	310.895.000	38	310.895.000	38	310.895.000	38	1.234.988.245	Bidang PPKB dan KK	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Peserta yang mengikuti Orientasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di Pondok Pesantren	Orang		38		-		-		-		38			
		2.14.03.1.01.02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kab/kota yang mendapatkan media promosi	Kab/Kota		-	302.303.245	38	245.415.538	38	245.415.538	38	245.415.538	38	1.038.549.859	Bidang PPKB dan KK	
				Jumlah peserta yang memahami materi dan sarana promosi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal yang tersedia	Orang		120		-		-		-		36			
		2.14.03.1.01.04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan KIE program KKBPK	Kab/kota		-	0	38	65.479.462	38	65.479.462	38	65.479.462	38	196.438.386	Bidang PPKB dan KK	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah lembaga yang dibangun/mendapatkan penguatan	Lembaga		-		38		38		38		38			
		2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	Persentase Mitra Organisasi Masyarakat di Jawa Timur yang telah mendapatkan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	%	50%	-	497.636.490	75%	500.000.000	85%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	1.997.636.490	Bidang PPKB dan KK	
				Persentase Kab/Kota yang CPR nya lebih besar sama dengan 80 %	Persen		50		-		-		-		50			
		2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pengelolaan desain program pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan	Buah		0	0	1	295.012.000	1	295.012.000	1	295.012.000	1	885.036.000	Bidang PPKB dan KK	
				Persentase Kab/Kota yang BKB dan BKR nya telah terintegrasi dengan Perlindungan Anak	Persen		60		-		-		-		60			
		2.14.04.1.01.01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan	Jumlah kebijakan Daerah bagi Pembangunan ketahanan Keluarga yang	dokumen	0	-	0	1	0	1	0	1	0	4	0	Bidang PPKB dan KK	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kesejahteraan Keluarga	tersedia														
		2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Mitra organisasi , Kemasyarakatan kader yang dibina ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Organisasi	50	-	0	76	0	76	0	76	0	304	0	Bidang PPKB dan KK	
		2.14.04.1.01.04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kader remaja yang dibina tentang keluarga berencana	Orang	76	-	0	76	0	76	0	76	0	304	0	Bidang PPKB dan KK	
		2.14.04.1.01.05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Kader yang dibina tentang akses dan kualitas ketahanan keluarga dan ketahanan remaja	Kader	76	-	0	76	0	76	0	76	0	304	0	Bidang PPKB dan KK	
		2.14.04.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling yang meningkat kapasitasnya	Orang	76	150	0	150	101.252.000	150	101.252.000	150	101.252.000	600	303.756.000	Bidang PPKB dan KK	
		2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Mitra organisasi kemasyarakatan kader yang ter Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	orang	76	-	0	150	193.760.000	150	193.760.000	150	193.760.000	526	581.280.000	Bidang PPKB dan KK	
		2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta	Jumlah mitra kerja aktif di tingkat provinsi yg	kelompok/organisasi/kader	76	76	497.636.490	76	204.988.000	76	204.988.000	76	204.988.000	304	1.112.600.490	Bidang PPKB dan KK	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	diberdayakan di bidang KS														
		2.14.04.1.02.03	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan UPPKS yang mendapatkan sosialisasi dan promosi tentang Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	kelompok/orang	0	-	0	100	0	150	0	160	0	170	0	Bidang PPKB dan KK	
		2.14.04.1.02.04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan	Jumlah mitra organisasi kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	organisasi/kelompok/orang	0	130	497.636.490	100	204.988.000	150	204.988.000	150	204.988.000	530	1.112.600.490	Bidang PPKB dan KK	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga														
			UPTD DP3AK					-		2.346.000.000		2.346.000.000		2.346.000.000		7.038.000.000		
		2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	100	-	-	100	144.000.000		144.000.000	100	144.000.000	100	432.000.000	Sekretar iat UPTD DP3AK	Jaw a Tim ur
				Persentase realisasi anggaran	Persen	96,28	-		95,75			95,9		96,15		96,15		
				Indeks profesionalitas ASN	-	81,93	-		81,05			81,15		81,30		81,30		
		2.08.01 .101	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	Dokume n	7	-	-	9	70.000.000,00		70.000.000,00	8	70.000.000,00	33	210.000.000	Sub Bag TU UPTD DP3AK	
		2.08.02. 101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	-		1	10.000.000		10.000.000	7	10.000.000	26	30.000.000		
		2.08.02. 101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1	-		1	10.000.000		10.000.000	1	10.000.000	4	30.000.000		
		2.08.02. 101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1	-		1	10.000.000		10.000.000	1	10.000.000	4	30.000.000		
		2.08.02. 101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	-		1	10.000.000		10.000.000	1	10.000.000	4	30.000.000		
		2.08.02. 101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	-		1	10.000.000		10.000.000	1	10.000.000	4	30.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			SKPD															
		2.08.02.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Dokumen	4	-		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	7	30.000.000		
		2.08.02.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	4	-		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	7	30.000.000		
		2.08.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	4	-	-	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	40	105.000.000	Sub Bag TU UPTD DP3AK	
		2.08.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	12	-	-	12	0	12	0	12	0	48	-		
		2.08.01.102.02	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	15	15.000.000		
		2.08.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	12	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	15	15.000.000		
		2.08.01.102.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi Perangkat Daerah	Laporan	12	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	15	15.000.000		
		2.08.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	Dokumen	2	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	15.000.000		
		2.08.01.102.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	Dokumen	1	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	15.000.000		
		2.08.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	12	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	15	15.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.08.01.102.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Laporan	1	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	15.000.000		
		2.08.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	15	-	-	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	51	60.000.000	Sub Bag TU UPTD DP3AK	
		2.08.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket/LS	1	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	15.000.000		
		2.08.01.105.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data pegawai	Laporan	12	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	15	15.000.000		
		2.08.01.105.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	Laporan	12	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	15	15.000.000		
		2.08.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	15.000.000		
		2.08.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan		-	-	11	8.000.000	11	8.000.000	11	8.000.000	33	24.000.000	Sub Bag TU UPTD DP3AK	
		2.08.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket/LS	1	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-		
		2.08.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket/LS	12	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	15	6.000.000		
		2.08.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	Paket/LS	1	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.08.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket/LS	1	-		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	6.000.000		
		2.08.01.106.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket pengadaan	paket/LS	1	-		1	-	1	-	1	-	4	-		
		2.08.01.106.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	paket/LS	1	-		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	6.000.000		
		2.08.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Laporan	4	-		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	7	6.000.000		
		2.08.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	36	9.000.000	Sub Bag TU UPTD DP3AK	
		2.08.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	-	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	15	3.000.000		
		2.08.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket/LS	1	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	6.000.000		
		2.08.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan			-	-	12	12	6.000.000	12	6.000.000	36	18.000.000	Sub Bag TU UPTD DP3AK	
		2.08.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket/LS	1	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	6.000.000		
		2.08.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket/LS	1	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	6.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (KONDISI AWAL TAHUN 2020	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Mesin Lainnya	yang dipelihara														
		2.08.01. 109.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Paket/LS	1	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	6.000.000		
		X.XX.01. 1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket/LS	1	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-		
		X.XX.01. 1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket/LS	1	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-		
		2.08.01 .113	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Produk Kehumasan yang terverifikasi	Persen	0	-	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	6.000.000	Sub Bag TU UPTD DP3AK	
		2.08.01. 113.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah hasil olah konten dokumentasi Kegiatan Kepala Dinas	Paket	1	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	6.000.000		
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	-	0	100	1.676.000.000	100	1.676.000.000	100	1.676.000.000	100	5.028.000.000	UPTD PPA	
		2.08.03 .1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan	Orang		-	0	85	1.676.000.000	85	1.676.000.000	85	1.676.000.000	85	5.028.000.000	Seksi Tindak Lanjut UPTD DP3AK	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	TPPO yang tertangani														
		2.08.03.1.02.01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	Orang		-	0	85	1.626.000.000	85	1.626.000.000	85	1.626.000.000	85	4.878.000.000	Seksi Tindak Lanjut UPTD DP3AK	
		2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Kali		-	0	10	50.000.000	11	50.000.000	12	50.000.000	12	150.000.000	Seksi Tindak Lanjut UPTD DP3AK	
		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif	Persen		-	0	100	526.000.000	100	526.000.000	100	526.000.000	100	1.578.000.000		
		2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Persentase Jenis Layanan yang Tersedia	Persen		-	0	100	526.000.000	100	526.000.000	100	526.000.000	100	1.578.000.000	Seksi Tindak Lanjut UPTD DP3AK	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi															
		2.08.07.1.02.01	Penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Jumlah jenis layanan yang tersedia	Layanan		-	0	4	451.000.000	4	451.000.000	4	451.000.000	4	1.353.000.000	Seksi Tindak Lanjut UPTD DP3AK	
		2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan	Orang		0	0	20	50.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	65	150.000.000	Seksi Tindak Lanjut UPTD DP3AK	
		2.08.07.1.02.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Jumlah jejaring / lembaga penyedia layanan anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	Jejaring/Lembaga		-	0	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	75.000.000	Bidang PTKA	
TOTAL PAGU DP3AK PROV JATIM								35.529.273.000		33.088.482.000,00		33.659.889.000,00		34.064.582.000,00		136.342.226.000,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,04	73,03	70,97	71,37	71,77	72,17	72,17
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,80	-	-	71,80	71,85	71,90	71,90
3	Persentase Data Base Kependudukan yang Akurat	99,47%	99,88%	98,5%	99,00%	99,50%	100%	100%
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	75,72%	75,69%	65,66%	66,08%	66,50%	67,04%	67,04%

Tabel 7.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Yang Mendukung Nawa Bhakti

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jatim Cerdas dan Sehat	Optimalisasi Pemenuhan Ruang Laktasi, ramah anak dan disabilitas di perkantoran, sekolahan dan berbagai ruang publik yang lain	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	182.549.000	360.934.000	360.934.000	360.934.000
				Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	645.564.192	564.138.000	564.138.000	564.138.000
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.514.226.624	1.090.000.000	1.090.000.000	1.090.000.000
	Mewujudkan Kab/Kota Ramah Anak, Ramah Disabilitas dan Ramah Lansia	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan keluarga	Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	497.636.490	204.988.000	204.988.000	204.988.000

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			
					2021	2022	2023	2024
			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	0	101.252.000	101.252.000	101.252.000
		Program Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Advokasi Kebijakan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah , Lembaga Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	649.515.524	392.000.000	392.000.000	392.000.000

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam periode tahun 2019-2024 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 untuk Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur untuk tahun yang sama.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur ini dapat berjalan efektif. Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Surabaya, 21 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dra. RESTU NOVI WIDIANI, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19661117 199103 2 008